

**PENGARUH *TAX PAYER FACTORS* TERHADAP
EFEKTIFITAS PEMUNGUTAN PBB – P2
(STUDI KASUS DESA WATUKEBO KECAMATAN
BLIMBINGSARI KABUPATEN BANYUWANGI)**

SKRIPSI



Oleh :

SRI BEKTI ARIYANI
NIM : E20163014

Dosen Pembimbing:

NUR IKA MAULIYAH, S.E., M.Ak
NIP. 198803012018012001

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
FEBRUARI 2020**

**PENGARUH *TAX PAYER FACTORS* TERHADAP
EFEKTIFITAS PEMUNGUTAN PBB – P2
(STUDI KASUS DESA WATUKEBO KECAMATAN
BLIMBINGSARI KABUPATEN BANYUWANGI)**

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Oleh :

SRI BEKTI ARIYANI
NIM. E20163014

Disetujui Pembimbing:



NUR IKA MAULIYAH, S.E., M.Ak
NIP. 198803012018012001

**PENGARUH *TAX PAYER FACTORS* TERHADAP
EFEKTIFITAS PEMUNGUTAN PBB – P2
(STUDI KASUS DESA WATUKEBO KECAMATAN
BLIMBINGSARI KABUPATEN BANYUWANGI)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam Program Studi Akuntansi Syariah

Hari : Kamis
Tanggal : 13 Februari 2020

Tim Penguji

Ketua



Daru Anando, S.E., M.Si
NIP. 197503032009011009

Sekretaris



Agung Parmono, S.E., M.Si
NIP. 197512162009121002

Anggota:

1. Dr. Khamdan Rifa'i, S.E., M.Si
2. Nur Ika Mauliyah, S.E., M.Ak



Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Jember




Dr. Khamdan Rifa'i, S.E., M.Si
NIP. 196808072000031001

MOTTO

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ
تُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya : “ Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras , dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal. (QS. Ali Imron [3] ayat 159).*

IAIN JEMBER

* Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009).

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kehadiran Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya Bapak Marjuki dan Ibu Suparmi yang selalu mendoakan saya, membimbing saya, mengajarkan saya dan mengarahkan saya demi masa depan yang lebih baik.
2. Seluruh keluarga yang tersayang Mbah Sulastriyah, Mbah Sujannah, Mas Moh. Hendra, yang senantiasa memberi saya semangat untuk menyelesaikan pendidikan saya.
3. Seluruh dosen IAIN Jember khususnya dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang sudah bersedia mengorbankan waktunya untuk memberikan ilmu kepada saya.
4. Almamaterku IAIN Jember dan seluruh teman-teman seperjuangan Akuntansi Syariah, teman-teman KKN posko 65, teman-teman PPL yang selalu menyemangati dan memberi bantuan serta seluruh kenang-kenangan terindah selama berada dibangku perkuliahan.

IAIN JEMBER

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. karena dengan limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya, penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan meskipun masih banyak kekurangan yang harus dibenahi. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari ada banyak pihak yang turut membantu dan memperlancar dalam proses penyusunan skripsi ini, baik dari awal hingga akhir. Oleh karenanya, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M Selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Dr. Khamdan Rifa'i, S.E., M.Si Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Daru Anando, S.E., M.Si Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Syariah.
4. Ibu Dr. Nurul Widyawati IR, S.Sos., M.Si Selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Ibu Nur Ika Mauliyah, S.E., M.Ak Selaku Dosen Pembimbing yang selalu membantu dan memberikan dorongan kepada penulis.
6. Bapak dan Ibu Dosen IAIN Jember yang telah memberi bekal pengetahuan kepada penulis.

7. Kantor Desa Watukebo yang telah memberikan izin kepada penulis untuk penelitian.
8. Para Wajib Pajak yang telah meluangkan waktunya untuk membantu terlaksananya penelitian.

Hanya ucapan terimakasih yang penulis dapat sampaikan, semoga bantuan, dukungan dan doa yang telah diberikan dapat menjadi catatan amal kebaikan dihadapan Allah SWT.

Akhirnya secercah harapan yang penulis tautkan, semoga hasil penelitian dalam skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Kesempurnaan hanya milik Allah SWT. kritik dan saran yang membangun senantiasa penulis harapkan demi perbaikan penulis karya sejenis dimasa yang akan datang. Dengan ucapan *Bismillahirrahmanirrahim*, penulis mempersembahkan karya sederhana ini dengan harapan semoga yang sedikit ini dapat memberi manfaat kepada semuanya. Amin Ya Robbal 'Alamin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

Jember, 13 Februari 2020
Penulis

Sri Bkti Ariyani
NIM. E20163014

ABSTRAK

Sri Bakti Ariyani, 2019 : *Pengaruh Tax Payer Factors Terhadap Efektifitas Pemungutan PBB – P2 (Studi Kasus Desa Watukebo Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi).*

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk kesejahteraan masyarakat.

Rumusan masalah dalam penelitian ini: (1) Apakah Pengetahuan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Efektifitas Pemungutan PBB – P2? (2) Apakah Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Efektifitas Pemungutan PBB – P2? (3) Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Efektifitas Pemungutan PBB – P2? (4) Apakah Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Efektifitas Pemungutan PBB – P2? (5) Apakah Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Efektifitas Pemungutan PBB – P2?

Tujuan dalam penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui adanya pengaruh Pengetahuan Pajak yang signifikan terhadap Efektifitas Pemungutan PBB – P2. (2) Untuk mengetahui adanya pengaruh Sanksi Pajak yang signifikan terhadap Efektifitas Pemungutan PBB – P2. (3) Untuk mengetahui adanya pengaruh Kesadaran Wajib Pajak yang signifikan terhadap Efektifitas Pemungutan PBB – P2. (4) Untuk mengetahui adanya pengaruh Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah yang signifikan terhadap Efektifitas Pemungutan PBB – P2. (5) Untuk mengetahui adanya pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah yang signifikan secara simultan terhadap Efektifitas Pemungutan PBB – P2.

Peneliti menggunakan jenis penelitian statistik dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak didesa watukebo kecamatan blimbingsari kabupaten banyuwangi. Tehnik pengambilan sampel menggunakan rumus slovin dan sampel yang digunakan sebanyak 98 responden. Analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi berganda.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan : (1) pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel efektifitas pemungutan PBB-P2. (2) sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap variabel efektifitas pemungutan PBB-P2. (3) kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel efektifitas pemungutan PBB-P2. (4) tingkat kepercayaan pada pemerintah berpengaruh signifikan terhadap variabel efektifitas pemungutan PBB-P2. (5) variabel pengetahuan pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan tingkat kepercayaan pada pemerintah berpengaruh signifikan terhadap efektifitas pemungutan PBB-P2 .

Kata Kunci: *Tax Payer Factor* dan efektifitas pemungutan PBB-P2.

ABSTRACT

Sri Bekti Ariyani, 2019: *The Effect of Tax Payer Factors on the Effectiveness of PBB Collection - P2 (Case Study of Watukebo Village, Blimbingsari District, Banyuwangi Regency).*

Taxes are mandatory contributions to the state owed by individuals or entities that are coercive based on the Act, with no direct compensation and are used for state needs for the welfare of society.

The formulation of the problem in this study: (1) Does Tax Knowledge significantly influence the Effectiveness of PBB-P2 Collection? (2) Does the Tax Sanction significantly influence the Effectiveness of PBB-P2 Collection? (3) Does awareness of taxpayers have a significant effect on the effectiveness of PBB-P2 collection? (4) Does the Level of Trust in the Government significantly influence the Effectiveness of PBB-P2 Collection? (5) Does Tax Knowledge, Tax Sanctions, Taxpayer Awareness, Level of Trust in the Government have a significant simultaneous effect on the effectiveness of PBB-P2 Collection?

The objectives in this study are: (1) To find out the influence of significant Tax Knowledge on the Effectiveness of PBB Collection - P2. (2) To find out the influence of significant Tax Sanctions on the Effectiveness of PBB Collection - P2. (3) To determine the significant influence of Taxpayer Awareness on the Effectiveness of PBB Collection - P2. (4) To find out the influence of the Level of Trust in the Government significantly on the Effectiveness of PBB Collection - P2. (5) To find out the influence of Tax Knowledge, Tax Sanctions, Taxpayer Awareness, Level of Trust in the Government which is simultaneously significant to the Effectiveness of PBB Collection - P2.

Researchers use this type of statistical research with a quantitative approach.. The population in this study is the taxpayer in Watukebo village Blimbingsari sub-district Banyuwangi. The sampling technique uses slovin formula and the sample used is 98 respondents. Analysis of the data used is multiple regression analysis.

Based on the research that has been done, it can be concluded: (1) tax knowledge has no significant effect on the effectiveness of PBB-P2 collection variables. (2) tax sanctions have a significant effect on the effectiveness of PBB-P2 collection variables. (3) taxpayer awareness does not have a significant effect on the effectiveness of PBB-P2 collection. (4) the level of trust in the government has a significant effect on the effectiveness of PBB-P2 collection. (5) variables of tax knowledge, tax sanctions, taxpayer awareness, and the level of trust in the government have a significant effect on the effectiveness of PBB-P2 collection.

Keywords: Tax payer factors and the effectiveness of PBB-P2 collection.

DAFTAR ISI

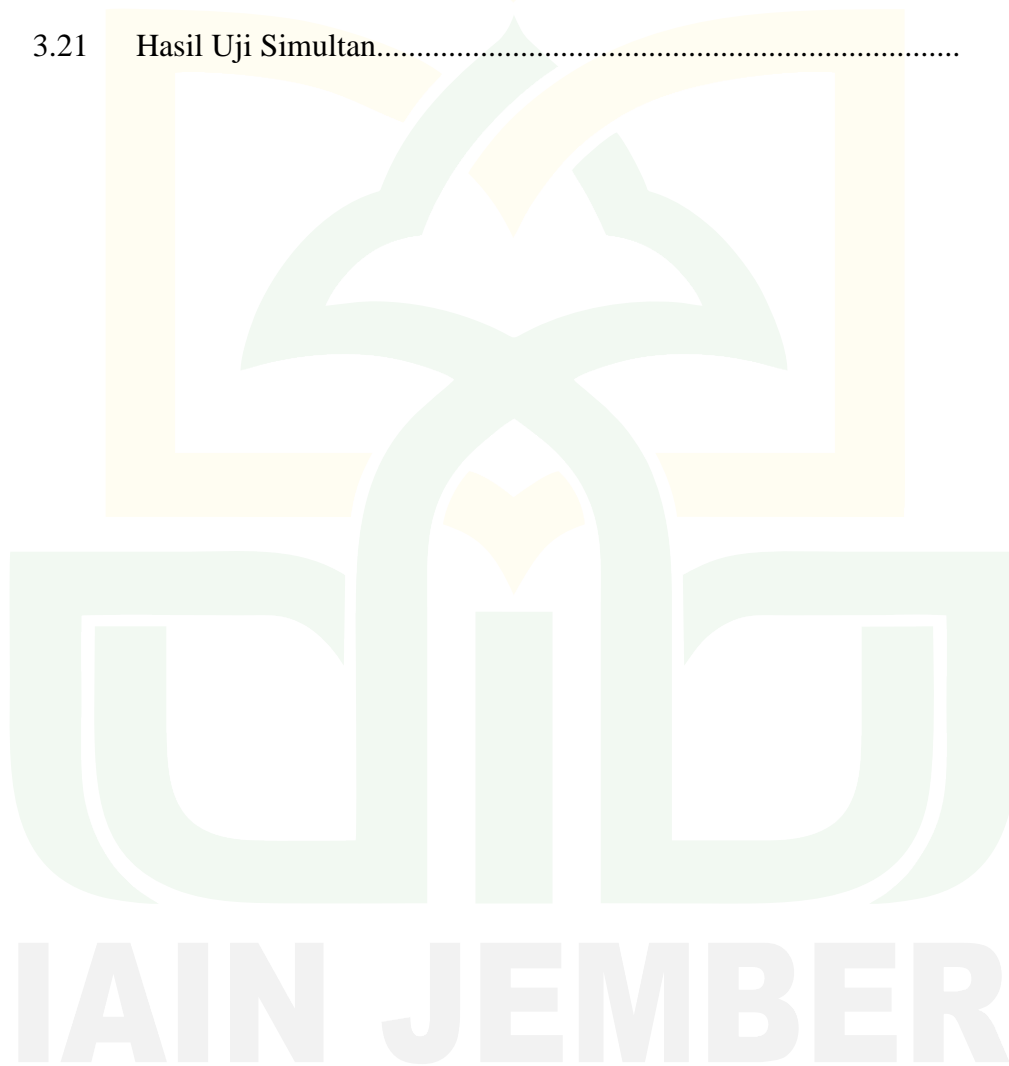
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR GRAFIK	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	12
1. Variabel Penelitian	12
2. Indikator Penelitian	13
F. Definisi Operasional.....	14

G. Asumsi Penelitian	20
H. Kerangka Konseptual	21
I. Hipotesis.....	22
J. Metode Penelitian.....	26
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	26
2. Lokasi Penelitian.....	27
3. Sumber Data.....	27
4. Populasi dan Sampel	28
5. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data.....	30
6. Analisis Data	32
K. Sistematika Pembahasan	42
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	44
A. Penelitian Terdahulu	44
B. Kajian Teori	50
BAB III PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	59
A. Gambaran dan Objek Penelitian.....	59
B. Penyajian Data	61
C. Analisis dan Pengujian Hipotesis.....	67
D. Pembahasan.....	86
BAB IV PENUTUP KESIMPULAN DAN SARAN.....	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA	96

DAFTAR TABEL

No.Uraian	Hal
1.1 Data Administrasi Wajib Pajak Desa Watukebo	8
1.2 Data Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan Desa Watukebo	28
1.3 Tabel Skor Penilaian Jawaban	31
2.1 Perbedaan Dan Persamaan Terhadap Penelitian Terdahulu	48
3.1 Pernyataan Responden Terhadap Variabel Y	62
3.2 Pernyataan Responden Terhadap Variabel X1	62
3.3 Pernyataan Responden Terhadap Variabel X2	63
3.4 Pernyataan Responden Terhadap Variabel X3	63
3.5 Pernyataan Responden Terhadap Variabel X4	63
3.6 Jenis Kelamin Responden	64
3.7 Usia Responden	65
3.8 Tingkat Pendidikan Responden	65
3.9 Jenis Pekerjaan Responden	66
3.10 Lokasi Pengambilan Sampel	66
3.11 Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian	67
3.12 Hasil Uji Reliabilitas Pengetahuan Pajak (X1)	69
3.13 Hasil Uji Reliabilitas Sanksi Pajak (X2)	69
3.14 Hasil Uji Reliabilitas Kesadaran Wajib Pajak (X3)	70
3.15 Hasil Uji Reliabilitas Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah (X4)	70

3.16	Hasil Uji Reliabilitas Efektifitas Pemungutan PBB-P2 (Y)	71
3.17	Hasil Uji Multikolonieritas	75
3.18	Hasil Uji Regresi Berganda	76
3.19	Hasil Uji Determinasi	79
3.20	Hasil Uji Parsial	82
3.21	Hasil Uji Simultan.....	85



DAFTAR GAMBAR

No.Uraian	Hal
3.1 Hasil Uji Normalitas	72
3.2 Hasil Uji Heterokedastisitas.....	73



DAFTAR GRAFIK

No.Uraian	Hal
1.1 Pendapatan Negara Semester I 2015-2019	2
1.2 Penerimaan PBB-P2 Desa Watukebo 2-15-2019.....	8



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Pernyataan Keaslian Tulisan

Lampiran 2 : Permohonan Izin Penelitian

Lampiran 3 : Surat Keterangan Diterima Penelitian

Lampiran 4 : Surat Keterangan Selesai Penelitian

Lampiran 5 : Jurnal Penelitian

Lampiran 6 : Matrik Penelitian

Lampiran 7 : Kisi-kisi angket penelitian

Lampiran 8 : Kuesioner Penelitian

Lampiran 9 : Data Hasil Responden Kuesioner

Lampiran 10 : Surat Pembayaran Pajak

Lampiran 11 : Peta Desa

Lampiran 12 : Hasil Uji Validitas dan Reabilitas

Lampiran 13 : Hasil Uji Asumsi Klasik

Lampiran 14 : Dokumentasi Penelitian

Lampiran 15 : Biodata Penulis

IAIN JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk kesejahteraan masyarakat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.¹

Potensi penerimaan pajak begitu penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan daerah. Salah satu jenis pajak yang ada di Indonesia yakni Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu jenis pajak yang sebagian besar hasilnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota khususnya sektor PBB perdesaan perkotaan.²

Sejak diberlakukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Pusat memberikan

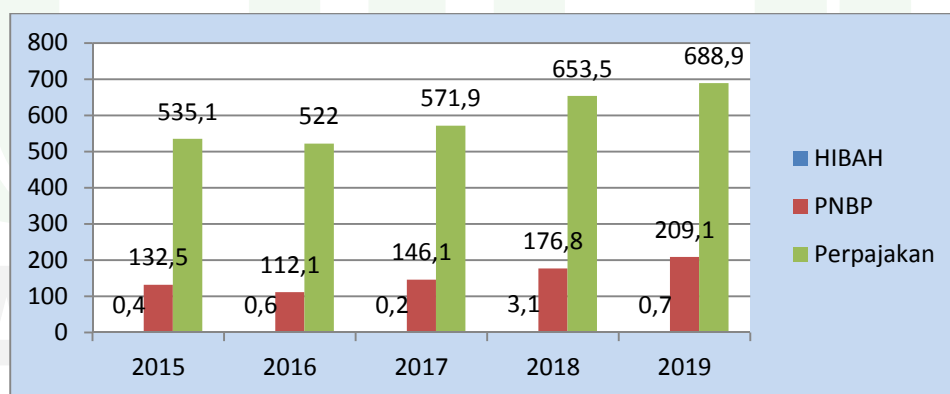
¹ Direktorat Jenderal Pajak. *Pengertian Pajak*. <https://pajak.go.id/id/pajak> diakses pada tanggal 19 September 2019.

² Yuni Setyowati, *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Kalidengen, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014*. Universitas Negeri Yogyakarta. *Jurnal Profita*, 2017, 2.

pelimpahan kewenangan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah/Kota.³ Dengan adanya kebijakan pengalihan pemungutan pajak kepada pemerintah daerah maka baik buruknya kinerja dalam pelaksanaan pembangunan sangat bergantung dari bagaimana konsistensi dan implementasi pengelolaan pajak yang secara sah menjadi kewenangan pemerintah daerah.⁴

Berdasarkan data yang diperoleh dari website Kementerian Keuangan 2019, secara keseluruhan realisasi pendapatan negara semester I tahun 2019 sebesar Rp898,8 triliun, dan mencapai 41,5 persen dari targetnya dalam APBN tahun 2019, tumbuh sebesar 7,8 persen dari realisasi periode yang sama tahun 2018. Dari realisasi pendapatan negara tersebut tercatat pertumbuhan terbesar terjadi pada pendapatan Pajak, dan pendapatan cukai. Seperti yang digambarkan pada Grafik berikut ini:

Grafik 1.1
Pendapatan Negara Semester I
Periode 2015-2019



Sumber: Website Kementerian Keuangan (2019).

³ Kementerian Keuangan, UU Nomor 28 Tahun 2009 http://www.djpk.depkeu.go.id/attach/post-no-28-tahun-2009-tentang-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah/UU-427-973-UU_28_Tahun_2009_Ttg_PDRD.pdf diakses pada tanggal 19 September 2019.

⁴ Mandala Harefa, *Kendala Implementasi Dan Efektivitas Pemungutan Pajak PBB-P2 Oleh Pemerintah Kota Makassar*. Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, Vol. 7, No. 1, Juni 2016. 67.

Berdasarkan data tersebut kinerja penerimaan perpajakan semester I tahun 2019 mampu tumbuh 5,4 persen, atau mencapai 38,6 persen dari targetnya dalam APBN tahun 2019. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai strategi kebijakan yang ditempuh antara lain dengan melanjutkan kebijakan reformasi perpajakan, termasuk di dalamnya penyempurnaan regulasi, penguatan kapasitas organisasi pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, memanfaatkan momentum pelaksanaan *Automatic Exchange of Information* (AEOI), dan memperbaiki administrasi perpajakan nasional. Meskipun penerimaan perpajakan mengalami kenaikan, pertumbuhannya dalam semester I tahun 2019 hanya sebesar 5,4 persen lebih lambat dari pertumbuhan periode yang sama di tahun 2018 sebesar 14,3 persen.⁵

Dalam hal ini pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak. Hal ini tidak hanya dilakukan pemerintah pusat tetapi dilakukan pula oleh pemerintah daerah. Otonomi daerah yang dititik beratkan pada kabupaten/kota sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang pemerintahan daerah, menuntut pemerintah daerah untuk mampu mengurus dan mengatur rumah tangga pemerintahannya sendiri. Hal ini mendorong pemerintah daerah untuk lebih mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan PAD

⁵ Kementerian Keuangan, *Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2019*, <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-realisasi-pendapatan-belanja-dan-pembiayaan-apbn-semester-i-tahun-2019>. Diakses pada tanggal 20 September 2019.

akan mempermudah pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pembangunan daerah.⁶

Pajak daerah dibagi menjadi dua yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak Provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor, pajak rokok, dan lain-lain. Sedangkan pajak Kabupaten/Kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan, dan lain-lain.⁷ Penelitian ini lebih fokus pada pajak kabupaten/kota. Pajak kabupaten/kota yang menjadi topik bahasan dalam penelitian ini adalah pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan (PBB-P2). PBB-P2 merupakan salah satu pajak yang jumlah objek pajaknya cukup banyak.

Pajak bumi bangunan perkotaan dan perdesaan (PBB P2) merupakan pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.⁸ Pemerintah kota Banyuwangi mengatur aturan-aturan mengenai pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan dalam peraturan daerah nomor 6 tahun 2012.⁹

⁶ Apriani Purnamasari, dkk., *Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Dan Hukum, Serta Nasionalisme Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB-P2 (Studi Pada Wajib Pajak PBB-P2 Di Kota Banjar)*. Jurnal Akuntansi dan Auditing. Vol.14 No. 1 Tahun 2017: 22.

⁷ Mardiasmo, *Perpajakan*. (Yogyakarta: Andi, 2016), 8.

⁸ Mardiasmo, *Perpajakan*. (Yogyakarta: Andi, 2016), 406.

⁹ Ditjen PP. Kemenkumham, *Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Perkotaan*. http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/ld/2012/KAB_BANYUWANGI_6_2012.pdf, diakses pada tanggal 23 September 2019.

Keberhasilan penerimaan perpajakan (*collection ratio*) dipengaruhi oleh *tax law*, *tax policy*, *tax administration*, dan *tax payer*.¹⁰ Dalam penelitian ini memfokuskan hanya pada salah satu faktor yaitu *tax payer*. *Tax payer factors* adalah faktor-faktor yang melekat pada wajib pajak. Oleh karena itu, pengetahuan tentang faktor-faktor yang melekat pada wajib pajak merupakan input penting bagi fiskus, dan sangat berperan penting dalam upaya peningkatan efektifitas pemungutan pajak.¹¹

Dalam Teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri atau berasal dari faktor internal seperti ciri kepribadian, kesadaran, pengetahuan. Hal ini merupakan atribusi internal.

Sedangkan, perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar atau dari faktor eksternal seperti peralatan atau pengaruh sosial dari orang lain, sanksi dan kepercayaan. Artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi, ini merupakan atribusi eksternal.¹²

Dalam hal ini, penelitian ini memfokuskan pada faktor internal yaitu pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak. Sedangkan yang menjadi fokus faktor eksternalnya adalah sanksi pajak dan tingkat kepercayaan kepada pemerintah.

¹⁰ Iftahul Rezki, *Pengaruh Tax Payer Factors Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Restoran (Studi Empiris di Kota Padang)*. Skripsi, Padang: Universitas Negeri Padang, 2014, 1.

¹¹ Ibid, 1.

¹² Stephen P. Robbins, *Perilaku Organisasi: Konsep, Kontroversi dan Aplikasi*. (Jakarta:Prehallindo, 1996).

Mekanisme pemungutan PBB-P2 dahulu dipungut dan diadministrasikan semuanya oleh pemerintah pusat tetapi hasilnya dibagikan lagi kepada masing-masing pemerintah daerah untuk pembangunan daerah. Mekanisme persentase bagi hasil pajak bumi dan bangunan berdasarkan Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yaitu 10% untuk pusat, 16,2% untuk provinsi dan 64,8% untuk kabupaten/kota. Sejak diberlakukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Pusat memberikan pelimpahan kewenangan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah/Kota¹³

Di Kota Banyuwangi sendiri, pemerintah Kota Banyuwangi mengambil alih kewenangan tersebut pada bulan januari 2014, dalam beberapa bulan setelah mengambil alih kewenangan untuk mengelola pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) tersebut, Kota Banyuwangi menjalankan tugas dan fungsinya sesuai keputusan yang sudah ditetapkan Direktorat Jendral Pajak (DJP) 2011 lalu agar kiranya pajak daerah dan retribusi bisa dimaksimalkan dengan baik guna meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di kota Banyuwangi.¹⁴

Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan perkotaan yang efektif akan menciptakan sumber penerimaan yang kuat bagi pemerintah daerah dan mengurangi ketergantungan dari pemerintah pusat, disamping Pajak Bumi

¹³ Andi Abdillah Hermansyah, *Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) Di Dispenda Kota Makassar*. Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2015, 20.

¹⁴ Kementerian Keuangan, <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/mulai-1-januari-2014-semua-kabupatenkota-di-indonesia-wajib-kelola-pbb-sendiri/>, diakses pada tanggal 26 Mei 2019.

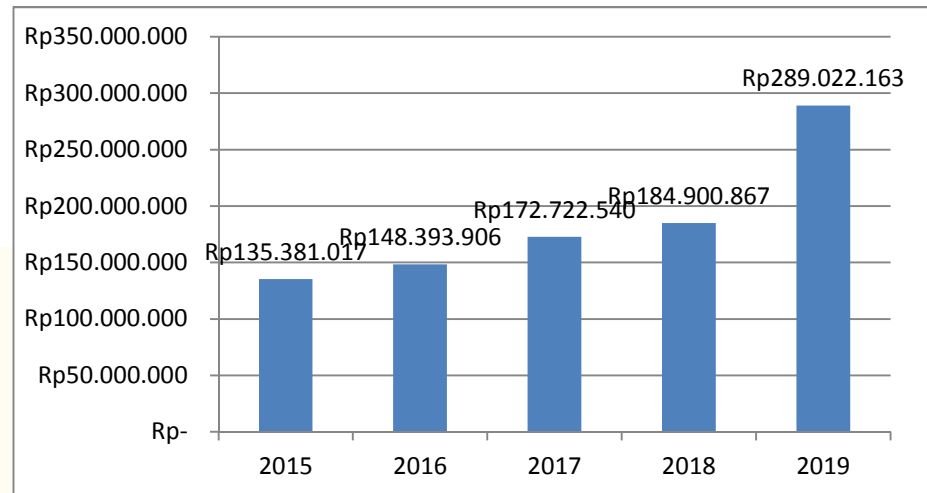
dan Bangunan perdesaan perkotaan mempunyai potensi pendapatan yang tinggi. Namun demikian Pajak Bumi dan Bangunan termasuk jenis pajak yang sulit dalam pengadministrasiannya dan mempunyai efektifitas pemungutan yang rendah karena jumlah objek pajaknya yang cukup banyak.

Times Banyuwangi menyebutkan bahwa Penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi dari total sepuluh desa, dua diantaranya berhasil mencapai realisasi penerimaan PBB-P2 100 persen namun delapan lainnya masih jauh tertinggal. Dua desa yang telah melunasi PBB-P2 adalah desa Bomo dan Patoman. Dari data laporan realisasi sementara peringkat ketiga ditempati oleh sukojati, keempat kaligung, kelima karangrejo, keenam blimbingsari, ketujuh kaotan, kedelapan watukebo, kesembilan badean, kesepuluh gintangan.¹⁵

Dari sepuluh desa diatas yang baru melunasi pembayaran pajak baru dua desa, dalam hal ini berarti masih cukup banyak wajib pajak yang belum membayar pajak. Salah satunya adalah desa watukebo yang berada di urutan kedelapan. Berdasarkan data yang diperoleh dari tahun 2015-2019 bahwa wajib pajak didesa watukebo yang belum melunasi PBB-P2 masih cukup banyak. Sehingga peneliti berkeinginan melakukan penelitian lebih mendalam. Berikut ini merupakan grafik penerimaan PBB-P2 Desa Watukebo Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi:

¹⁵ Times Banyuwangi, <https://www.timesbanyuwangi.com/berita/23503/realisasi-pajak-kecamatan-blimbingsari-desa-bomo-terbaik-desa-gintangan-terburuk>, diakses pada tanggal 18 Desember 2019.

Grafik 1.2
Penerimaan PBB-P2 Desa Watukebo Tahun 2015-2019



Sumber: Data diolah

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa penerimaan pajak Desa Watukebo dari tahun ketahun terus mengalami kenaikan terlebih tahun 2019. Walaupun demikian, akan tetapi wajib pajak Desa Watukebo yang belum membayar pajak masih cukup banyak. Berikut ini merupakan tabel wajib pajak yang sudah membayar pajak dan belum membayar pajak:

Tabel 1.1
Data Administrasi Wajib Pajak Desa Watukebo

Tahun	Sudah Membayar	Belum Membayar
2015	1692	1082
2016	1714	2619
2017	2208	2122
2018	2309	2030
2019	3248	1089

Sumber: Data diolah

Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa yang belum membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan setiap tahunnya terdapat ribuan orang yang belum membayar pajak. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul **“Pengaruh *Tax Payer Factors* Terhadap Efektifitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Pekotaan (Studi Kasus Desa Watukebo Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi)”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah berbeda dengan masalah, masalah merupakan ketidak seimbangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi. Maka rumusan masalah itu merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Rumusan masalah dan masalah memiliki kaitan, karena setiap rumusan masalah penelitian harus didasarkan pada masalah.¹⁶ Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalah untuk penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah Pengetahuan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Efektifitas Pemungutan PBB – P2?
2. Apakah Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Efektifitas Pemungutan PBB – P2?
3. Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Efektifitas Pemungutan PBB – P2?

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif. Dan R&D.* (Bandung: Alfabeta, 2018), 35.

4. Apakah Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Efektifitas Pemungutan PBB – P2?
5. Apakah Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Efektifitas Pemungutan PBB – P2?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arahan yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu dan konsisten dengan masalah-masalah yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.¹⁷ Adapun tujuan yang dapat dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui adanya pengaruh Pengetahuan Pajak yang signifikan terhadap Efektifitas Pemungutan PBB – P2.
2. Untuk mengetahui adanya pengaruh Sanksi Pajak yang signifikan terhadap Efektifitas Pemungutan PBB – P2.
3. Untuk mengetahui adanya pengaruh Kesadaran Wajib Pajak yang signifikan terhadap Efektifitas Pemungutan PBB – P2.
4. Untuk mengetahui adanya pengaruh Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah yang signifikan terhadap Efektifitas Pemungutan PBB – P2.
5. Untuk mengetahui adanya pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah yang signifikan secara simultan terhadap Efektifitas Pemungutan PBB – P2.

¹⁷ IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. (Jember:IAIN Jember Press, 2017), 37.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi yang akan diberikan setelah melakukan penelitian.¹⁸ Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang positif bagi semua pihak, diantaranya :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi serta yang berkaitan dengan pendidikan sebagai referensi berupa karya ilmiah ataupun bahan kajian dalam mengembangkan pemikiran yang mana hal ini memiliki andil yang besar terhadap perkembangan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang terdapat pada penelitian ini adalah :

a. Bagi Peneliti

Memberikan informasi dan kontribusi yang berguna untuk pengembangan penelitian terutama dalam hal perpajakan dan pengaruh *tax payer factors* terhadap efektifitas pemungutan PBB – P2 dalam hal ini adalah pada Desa Watukebo Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi.

b. Bagi Lembaga yang Diteliti

Dapat dijadikan masukan untuk membantu pihak Desa Watukebo terutama untuk melihat pengaruh *tax payer factors* terhadap efektifitas pemungutan PBB – P2.

¹⁸ Ibid, 38.

c. Bagi IAIN Jember

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dibidang ilmu pendidikan serta dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu tolak ukur bagi peneliti selanjutnya, dan sebagai sebuah referensi dalam pelaksanaan penelitian selanjutnya.

E. Ruang Lingkup Penelitian

1. Variabel Penelitian

Variabel penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁹ Variabel dalam penelitian ini memfokuskan pada 2 variabel, yaitu variable bebas (X) dan variable terikat (Y). Dengan uraian sebagai berikut:

a. Variabel Independen/ Variabel Bebas (X)

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab besar kecilnya nilai variabel yang lain.²⁰ Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas (X) Adalah *Tax Payer Factors* yang terdiri dari Pengetahuan Pajak (X_1), Sanksi Pajak (X_2), Kesadaran Wajib Pajak (X_3) dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah (X_4).

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif. Dan R&D*,...38.

²⁰ Suliyanto, *Ekonomitrika Terapan, Teori dan Aplikasi dengan SPSS*. (Yogyakarta: Andi, 2011), 7.

b. Variabel Dependen/ Variabel Terikat (Y)

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.²¹ Adapun yang menjadi variabel terikat (Y) dalam penelitian ini adalah Efektifitas Pemungutan PBB-P2.

2. Indikator Variabel

Indikator adalah ukuran, yakni hal-hal yang menunjukkan keterwakilan dari nilai sebuah variabel. Indikator variabel dalam penelitian ini adalah:

a. Efektifitas Pemungutan PBB-P2

Indikator efektifitas pemungutan PBB-P2 meliputi:²²

- 1) Pelaksanaan pemungutan pajak sesuai dengan ketentuannya.
- 2) Pelayanan pembayaran pajak.
- 3) Memperoleh informasi yang tepat dalam pembayaran PBB-P2

b. Pengetahuan Pajak

Indikator pengetahuan pajak meliputi:²³

- 1) Pengetahuan mengenai ketentuan umum perpajakan
- 2) Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia
- 3) Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan

²¹ Ibid, 8.

²² Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, *Kesadaran Pajak* (Jakarta: Tim Edukasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak, 2016), 82.

²³ Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Indonesia* (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2013), 29.

c. Sanksi Pajak

Indikator sanksi pajak meliputi:²⁴

- 1) Pengetahuan wajib pajak tentang adanya sanksi perpajakan
- 2) Sikap wajib pajak terhadap adanya sanksi perpajakan

d. Kesadaran Wajib Pajak

Indikator kesadaran wajib pajak meliputi:²⁵

- 1) Mengetahui adanya kewajiban membayar pajak
- 2) Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan Negara
- 3) Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

e. Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah

Indikator tingkat kepercayaan pada pemerintah meliputi:²⁶

- 1) Kepercayaan terhadap sistem pemerintah
- 2) Kepercayaan terhadap sistem hukum
- 3) Kepercayaan terhadap fiskus.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah definisi yang digunakan sebagai pijakan pengukuran secara empiris terhadap variabel penelitian dengan rumusan yang didasarkan pada indikator variabel.²⁷ Berikut ini definisi operasional dalam penelitian ini:

²⁴ Mardiasmo, *Perpajakan* (Yogyakarta: Andi, 2016), 62.

²⁵ Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, *Kesadaran Pajak* (Jakarta: Tim Edukasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak, 2016), 83.

²⁶ Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Indonesia* (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2013)

²⁷ IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. (Jember:IAIN Jember Press, 2017), 38.

1. Pengetahuan Pajak

Pengetahuan berasal dari kata “Tahu” yang artinya mengerti, mengenal, mengindahkan. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui yang berkaitan dengan suatu hal tertentu.²⁸ Jadi Pengetahuan Pajak adalah segala sesuatu yang diketahui dalam hal informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan.²⁹

Adanya pengetahuan pajak dapat berguna oleh wajib pajak untuk mengambil keputusan dalam melaksanakan sistem perpajakan yang ada. Pada pengetahuan perpajakan terdapat konsep pengetahuan atau pemahaman pajak yaitu wajib pajak harus meliputi :³⁰

a. Pengetahuan Mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

b. Pengetahuan Mengenai Sistem Perpajakan di Indonesia

Sistem perpajakan di Indonesia yang diterapkan saat ini adalah *self assessment system* yaitu pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk

²⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://www.kbbi.web.id/tahu>, diakses pada tanggal 4 Oktober 2019.

²⁹ Titis Wahyu Adi, *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Cilacap Tahun 2018*. Skripsi, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2018, 28.

³⁰ Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 141.

menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

c. Pengetahuan Mengenai Fungsi Perpajakan

Terdapat dua fungsi pajak yaitu sebagai berikut:

1) Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2) Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

2. Sanksi Pajak

Sanksi adalah tanggungan, tindakan, hukuman dan sebagainya untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang yang berlaku.³¹ Sanksi merupakan alat pemaksa untuk dipatuhi yang memberikan ancaman hukuman yang diberikan kepada pelanggar hukum. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.³²

Sedangkan berdasarkan teori atribusi, sanksi perpajakan merupakan penyebab eksternal yang dapat mempengaruhi persepsi

³¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://www.kbbi.web.id/sanksi>, diakses pada tanggal 4 Oktober 2019.

³² Mardiasmo, *Perpajakan* (Yogyakarta: Andi, 2016),31.

wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.³³

Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana. Perbedaan sanksi administrasi dan sanksi pidana adalah:³⁴

a. Sanksi Administrasi

Merupakan pembayaran kerugian kepada Negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan ada 3 macam sanksi administrasi, yaitu berupa denda, bunga, dan kenaikan.

b. Sanksi Pidana

Merupakan siksaan atau penderitaan. Merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi.

3. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran berasal dari kata “Sadar” yang artinya insaf, merasa, tahu, dan mengerti. Kesadaran adalah hal yang dirasakan atau dialami

³³ Apriani Purnamasari, dkk., *Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Dan Hukum, Serta Nasionalisme Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB-P2 (Studi Pada Wajib Pajak PBB-P2 Di Kota Banjar)*. Jurnal Akuntansi dan Auditing. Vol. 14, No. 1 Tahun 2017, 25.

³⁴ Mardiasmo, *Perpajakan...* 63.

oleh seseorang.³⁵ Kesadaran Wajib Pajak merupakan perilaku Wajib Pajak berupa pandangan atau persepsi yang melibatkan keyakinan, pengetahuan dan penalaran serta kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan perpajakan yang berlaku.³⁶

Menurut pendapat Soemitro, kesadaran pajak (*tax consciousness*) rakyat Indonesia masih rendah, dan perlu ditingkatkan melalui pendidikan yang lebih terstruktur, supaya mereka mengerti fungsi dan kegunaan pajak dalam masyarakat dan manfaat bagi diri pribadi. kesadaran pajak harus diikuti dengan rasa tertarik untuk membayar pajak (*tax madidness*), dan akhirnya melahirkan sikap disiplin dalam membayar pajak (*tax discipline*).³⁷

Soemitro membedakan antara kepatuhan membayar pajak dengan kesadaran membayar pajak. Kesadaran membayar pajak lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan kepatuhan membayar pajak. Kesadaran membayar pajak dilandasi oleh pemahaman akan kegunaan dan manfaat pajak bagi masyarakat dan bagi dirinya (*morally autonomous*), sedangkan kepatuhan membayar pajak itu lebih didorong

³⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://www.kbbi.web.id/sadar>, diakses pada tanggal 4 Oktober 2019.

³⁶ Pandapotan Ritonga, *Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Ssurat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur*. Jurnal SAINTIKOM Vol. 11, No.3, September 2012.

³⁷ Tim Edukasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak, *Materi Terbuka Kesadaran Pajak untuk Perguruan Tinggi* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2016), 83.

oleh faktor eksternal sehingga bersifat heteronomi secara moral (*morally heteronomous*).³⁸

4. Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah

Kepercayaan berasal dari kata “Percaya” yang artinya mengakui atau yakin bahwa sesuatu memang benar atau nyata. Kepercayaan adalah anggapan atau keyakinan bahwa sesuatu yang dipercayai itu benar atau nyata.³⁹ Salah satu usaha membangun kepercayaan rakyat kepada pemerintah adalah dengan mewujudkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa atau yang dikenal dengan istilah *good governance*.

Pedoman umum yang dikeluarkan oleh Komite Nasional kebijakan *Governance* (KNKG) menyebutkan terdapat 5 asas *good governance* antara lain transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran dan kesetaraan. Ketika asas itu dipenuhi oleh pemerintah maka pemerintahan tersebut dianggap bersih (*good governance*).⁴⁰

Dalam hal ini kepercayaan terhadap sistem pemerintahan, kepercayaan terhadap sistem hukum, kepercayaan terhadap politisi dan kepercayaan terhadap pemungutan pajak merupakan salah satu

³⁸ Ibid, 83.

³⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://www.kbbi.web.id/sadar>, diakses pada tanggal 4 Oktober 2019.

⁴⁰ Cristi Devi Darnita dan Yenni Mangoting, *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Efektifitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Pedesaan Kota Palangka Raya*. *Tax & Accounting Review*, Vol 4, No. 2, 2014, 25.

pendorong bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.⁴¹ Terdapat hubungan wajib pajak dengan pemerintah, yaitu kepercayaan mereka terhadap pemerintah merupakan pertimbangan penting dalam mematuhi aturan perpajakan dan mempengaruhi mereka dalam kepatuhan membayar pajak.⁴²

5. Efektifitas Pemungutan PBB-P2

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya.⁴³ Efektivitas suatu pelaksanaan kegiatan pemungutan PBB-P2 tergantung kepada sejauh mana kegiatan tersebut mencapai tujuannya. Yaitu untuk meningkat penerimaan pajak selain itu tujuan pokok dari pemungutan pajak ini adalah untuk kesejahteraan umum atau masyarakat.⁴⁴

G. Asumsi Penelitian

Asumsi penelitian biasa disebut juga sebagai anggapan dasar yaitu sebuah titik tolak pemikiran yang kebenarannya diterima oleh peneliti. Anggapan dasar ini harus dirumuskan secara jelas sebelum peneliti melangkah mengumpulkan data. Anggapan dasar disamping berfungsi sebagai dasar berpijak yang kukuh bagi masalah yang diteliti juga untuk

⁴¹ Handayani, *Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas*. Jurnal Universitas Soedirman, 2012.

⁴² B. Togler, *Tax compliance and tax morale: A theoretical and empirical analysis*. Edward Elgar Publishing, Inc, 2007.

⁴³ Mardiasmo, *Perpajakan* ... 10.

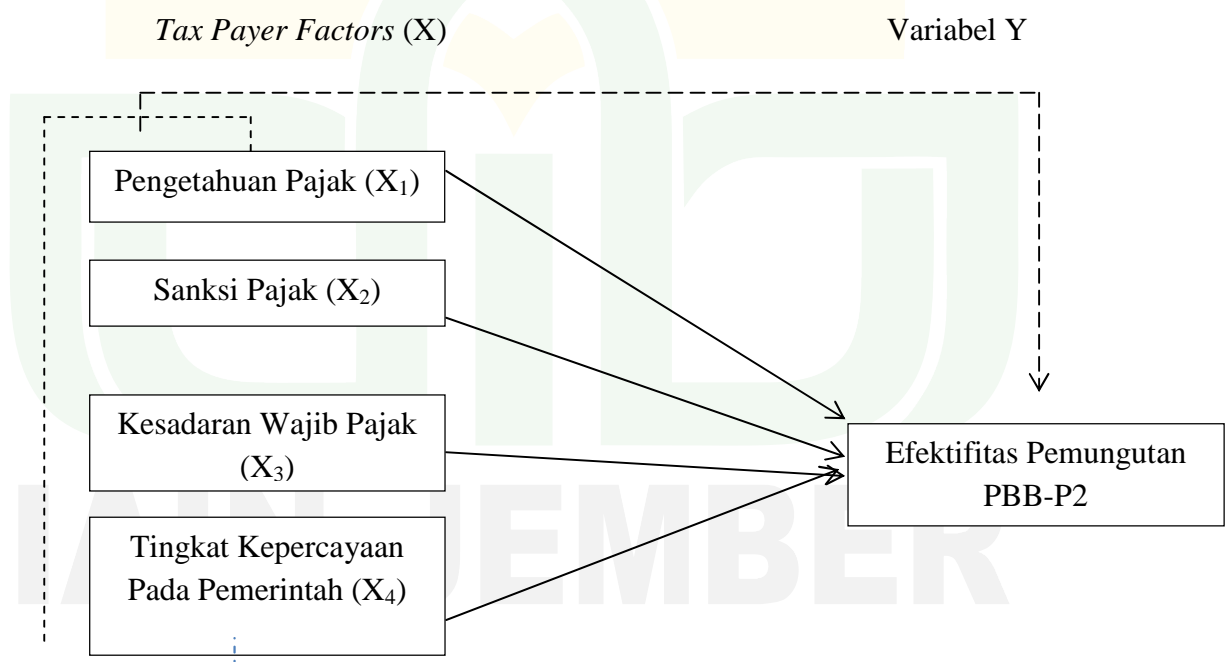
⁴⁴ Mustafa Hasbar dan Agung Wijaya, *Efektifitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) Dengan Pendekatan Strategy SWOT Analysis Di Kabupaten Enrekang*. Magister Administrasi Publik STISIP Muhammadiyah Rappang Sidenreng Rappang, Indonesia.

mempertegas variabel yang menjadi pusat perhatian penelitian dan merumuskan hipotesis.⁴⁵

Asumsi penelitian ini menyatakan bahwa yang mempengaruhi efektifitas pemungutan PBB P2 adalah pengetahuan pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, tingkat kepercayaan pemerintah.

H. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan model berpikir tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka konseptual yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang diteliti.⁴⁶ Berikut ini merupakan kerangka konseptual dari penelitian ini:



⁴⁵ IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 39.

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif. Dan R&D...* 60.

Keterangan :

—————> = Parsial (Pengaruh interaksi masing-masing variabel X terhadap Y)

-----> = Simultan (Pengaruh interaksi variabel X secara bersama-sama terhadap Y)

I. Hipotesis

Hipotesis Penelitian merupakan langkah ketiga dalam penelitian, setelah peneliti mengemukakan landasan teori. Hipotesis sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan dan belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.⁴⁷ Ada dua jenis hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Hipotesis Kerja (Ha)

Hipotesis kerja disebut juga hipotesis alternatif merupakan hipotesis yang didalamnya berisi ide-ide atau tanggapan mengenai langkah-langkah yang kemudian mungkin bermanfaat untuk dilakukan. Hipotesis kerja ini menyatakan adanya hubungan antara variabel X dan variabel Y atau adanya perbedaan antara dua kelompok.

2. Hipotesis Nol (H0)

Hipotesis yang memberikan jawaban yang tepat mengenai persoalan penelitian dan menentukan langkah yang akan menguji kebenaran tanggapan itu. Hipotesis ini sering disebut juga hipotesis statistik, yaitu

⁴⁷ Ibid, 63.

diuji dengan perhitungan statistik. Hipotesis nol ini menyatakan tidak adanya hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Adapun yang menjadi hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

a. Pengaruh antara Pengetahuan Pajak Terhadap Efektifitas Pemungutan PBB P2.

Pengetahuan pajak dapat berguna oleh wajib pajak untuk mengambil keputusan dalam melaksanakan sistem perpajakan yang ada.⁴⁸ Pengetahuan pajak sangat diperlukan bagi masyarakat Indonesia, dengan pengetahuan pajak mereka akan mengerti fungsi dan kegunaan pajak dalam masyarakat dan manfaat bagi diri pribadi.⁴⁹

Dengan pengetahuan wajib pajak yang cukup memadai maka akan mempermudah wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajak. Dalam hal ini maka pengetahuan pajak dapat meningkatkan efektifitas pemungutan pajak.⁵⁰ Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis yang dirumuskan adalah:

H_1 : Ada pengaruh signifikan pengetahuan pajak terhadap efektifitas pengutan PBB P2.

⁴⁸ Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 141.

⁴⁹ Tim Edukasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak, *Materi Terbuka Kesadaran Pajak untuk Perguruan Tinggi ...*, 83.

⁵⁰ Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Indonesia...*29.

b. Pengaruh antara Sanksi Pajak Terhadap Efektifitas Pemungutan PBB P2.

Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.⁵¹ Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis yang dirumuskan adalah:

H₂ : Ada pengaruh signifikan sanksi pajak terhadap efektifitas pengutan PBB P2.

c. Pengaruh antara Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Efektifitas Pemungutan PBB P2.

Kesadaran membayar pajak bukan hanya tanggung jawab instansi pajak. Warga negara juga memiliki peran penting untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak. Kesadaran membayar pajak dilandasi oleh pemahaman akan kegunaan dan manfaat pajak bagi masyarakat dan bagi dirinya. Kesadaran wajib pajak juga sangat penting, dalam hal ini kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan efektifitas pemungutan pajak.⁵² Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis yang dirumuskan adalah:

H₃ : Ada pengaruh signifikan kesadaran wajib pajak terhadap efektifitas pengutan PBB P2.

⁵¹ Mardiasmo, *Perpajakan...* 62.

⁵² Tim Edukasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak, *Materi Terbuka Kesadaran...* 83.

d. Pengaruh antara Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Efektifitas Pemungutan PBB P2.

Kepercayaan pada pemerintah merupakan wujud harapan wajib pajak kepada aparat dalam menjalankan sistem pemerintahan dan hukum agar sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku.⁵³

Dalam hal ini wajib pajak berharap pemerintah yang sudah dipercaya menjalankan sistem pemerintahan sesuai norma yang berlaku. Oleh karena itu kepercayaan pada pemerintah sangat berpengaruh terhadap efektifitas pemungutan pajak. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis yang dirumuskan adalah:

H₄ : Ada pengaruh signifikan tingkat kepercayaan pada pemerintah terhadap efektifitas pengutan PBB P2.

e. Pengaruh antara Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Efektifitas Pemungutan PBB P2.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Darnita dan Yenni Mangoting (2014) menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas pemungutan PBB P2 adalah faktor Pengetahuan wajib pajak, cara pemungutan pajak, asas manfaat pajak, efektifitas peran pihak ketiga, kepatuhan wajib pajak, e-system perpajakan, sosialisasi berkesinambungan, pelayanan prima, dan peraturan yang lengkap.

⁵³ Apriani Purnamasari, dkk., *Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan...*, 26.

Hasil penelitian menyatakan pendapatan PBB-P2 tahun 2014 dibandingkan dengan perencanaan PBB-P2 tahun 2014 menghasilkan nilai efektifitas pemungutan PBB-P2 sebesar 71.96% didapat dari perbandingan realiasi dan target PBB-P2 tahun 2014. Maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_5 : Ada Pengaruh signifikan Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Efektifitas Pemungutan PBB P2.

J. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Dengan jenis penelitian statistik. Metode ini diperlukan untuk menguji apakah hipotesis penelitian yang hanya diuji dengan data sampel itu dapat diberlakukan untuk populasi atau tidak. Dalam pembuktian ini akan muncul signifikansi, atau taraf kesalahan kepercayaan diri penguji. Signifikan artinya hipotesis penelitian yang telah terbukti pada sampel itu dapat diberlakukan dipopulasi.⁵⁴

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuntitatif, Kualitatif dan R & D*,..65.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Watukebo Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi. Pemilihan desa watukebo sebagai lokasi penelitian dengan alasan sebagai berikut;

- a. Penelitian ini memfokuskan pada efektifitas pemungutan PBB P2, jika penelitian di Desa dalam hal ini sangat relevan.
- b. Berdasarkan website Times Banyuwangi dalam realisasi penerimaan pajak, Desa Watukebo berada pada urutan ke delapan.
- c. Masih kurangnya pengetahuan serta kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB P2.
- d. Desa Watukebo sebagai tempat tinggal peneliti sehingga peneliti lebih mudah untuk melakukan pendekatan dengan responden.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil dari pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dalam kepustakaan dan internet.⁵⁵

Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari pengisian kuesioner yang dilakukan oleh wajib pajak yang terdaftar di Desa

⁵⁵ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis...*42.

Watukebo. Sedangkan untuk data sekunder diperoleh dari buku, dokumen, jurnal atau sekripsi serta media social atau internet.

4. Populasi Dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁵⁶ Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak di Desa Watukebo Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.⁵⁷ Pada intinya teknik ini menjelaskan bahwa dalam menetapkan sampel peneliti sudah mengetahui ciri khusus yang ditetapkan menjadi responden dalam penelitian ini. Rincian subyek penelitian seperti pada tabel berikut:

Tabel 1.2
Data Wajib Pajak Bumi dan Bangunan P2 Desa Watukebo

No.	Dusun	Jumlah
1	Krajan	± 938
2	Patoman	± 935
3	Gepuro	± 768
4	Glondong	± 403
5	Gumung Agung	± 824
6	Amerthasari	± 201
7	Lain-lain	± 266
Jumlah		4335

Sumber: Dokumen Kantor Desa Watukebo (2019).

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif. Dan R&D...* 80.

⁵⁷ Ibid, 85.

Dalam hal ini pemilihan sampel berdasarkan dengan karakteristik tertentu yang dianggap mempunyai sangkut paut dengan karakteristik populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Dengan menggunakan rumus Slovin seperti berikut:⁵⁸

$$n = \frac{N}{1+N e^2}$$

Keterangan:

n = Ukuran sampel

N = Ukuran Populasi

e = Persen kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan yaitu 10 %. Jadi

sampel dari penelitian ini sebanyak:

$$N = 4335$$

$$e = 10 \%$$

$$\begin{aligned} n &= \frac{4335}{1+4335 (10 \%)^2} \\ &= 97,745 / 98 \end{aligned}$$

Jadi responden pada penelitian ini sebanyak 98 responden.

5. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas hasil penelitian, yaitu kualitas pengumpulan instrumen dan teknik pengumpulan instrumen. Kualitas instrument penelitian berkaitan dengan validitas dan reabilitas instrument, sedangkan teknik pengumpulan data berkaitan dengan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Instrument yang telah teruji

⁵⁸ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis ...*78.

validitas dan reliabilitasnya, belum tentu dapat menghasilkan data yang valid dan reabel, apabila instrument tersebut tidak digunakan secara tepat dalam pengumpulan datanya.⁵⁹

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapat data.⁶⁰ Adapun instrument yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

a. Kuesioner (Angket)

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk menjawabnya.⁶¹

Angket pada penelitian ini dilakukan untuk menggali data mengenai pengetahuan pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, tingkat kepercayaan pada pemerintah terhadap efektifitas pemungutan PBB-P2.

Dalam penelitian ini menggunakan pengukuran skala yaitu skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan skala likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrument yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan.

⁵⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif. Dan R&D...*.222.

⁶⁰ Ibid,224.

⁶¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif. Dan R&D*,142.

Jawaban setiap item yang menggunakan skala likert menunjukkan nilai atau skor.⁶² Berikut ini merupakan table dari skala likert:

Tabel 1.3
Tabel Skor Penilaian Jawaban

Skala Likert	Skor Nilai
Sangat Setuju	5
Setuju	4
Kurang Setuju	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

Sumber: Suliyanto (2019)

b. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting yaitu proses-proses pengamatan dan ingatan.⁶³ Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.⁶⁴

c. Dokumentasi

Dokumentasi memiliki arti barang-barang yang tertulis. Dalam pelaksanaannya, peneliti melakukan penyelidikan terhadap benda-benda tertulis seperti buku, catatan, notulen, dan sebagainya.⁶⁵

⁶² Suliyanto, *Ekonometrika Terapan*,... 10.

⁶³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif. Dan R&D*.145.

⁶⁴ Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, 149.

⁶⁵ Ibid, 149.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan.⁶⁶ Adapun alat analisis kuantitatif menggunakan program SPSS 22 (*Statistical Package For Social Sciences*) adalah sebagai berikut:

a. Uji Instrumen Penelitian

1) Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner tersebut. Suatu instrument yang valid mempunyai validitas tinggi dan sebaliknya bila validitasnya rendah maka instrument tersebut kurang valid. Sebuah instrument yang valid apabila mampu mengukur apa yang hendak diukur/diinginkan.⁶⁷

Adapun rumusan yang digunakan untuk menguji tingkat validitas instrument dalam penelitian ini yaitu menggunakan rumus korelasi. Hasil r_{hitung} kita bandingkan dengan r_{tabel} dimana $df = n -$

⁶⁶ Ibid, 147.

⁶⁷ Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Teori dan Aplikasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 170.

2 dengan signifikansi 5%. Jika $r_{tabel} < r_{hitung}$, maka valid dan sebaliknya.⁶⁸

2) Uji Reliabilitas

Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa sesuatu instrument dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrument tersebut sudah dianggap baik.⁶⁹

Hasil penelitian yang reliabel bila terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Alat ukur untuk mengukur reliabilitas adalah *Cronbach Alpha*. Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai $alpha > 0,60$.⁷⁰

b. Uji Asumsi Klasik

Untuk mendapatkan nilai pemeriksaan yang efisien dari suatu persamaan regresi linier berganda maka perlu dilakukan pengujian dengan memenuhi persyaratan asumsi klasik yang meliputi:

1) Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah variabel dependen, independen atau keduanya berdistribusi normal atau tidak. Nilai variabel dikatakan berdistribusi normal jika nilai

⁶⁸ Riduwan dan Sunarto, *Pengantar Statistik Untuk Penelitian Pendidikan, Sosial, Ekonomi, Komunikasi, dan Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2014), 348.

⁶⁹ Ibid, 148.

⁷⁰ V. Wiratna Sujarweni, *SPSS Untuk Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), 192.

variabel tersebut sebagian besar mendekati nilai rata-ratanya.⁷¹ Hal tersebut dapat diketahui dengan menggambarkan penyebaran data melalui sebuah grafik. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonalnya, maka model tersebut memenuhi asumsi normalitas.⁷²

Grafik tersebut menggunakan *Normal Probability Plot* yaitu dengan membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal digambarkan dengan diagonal lurus dari kiri bawah kekanan atas.⁷³

2) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Sebaliknya jika varian variabel pada model regresi memiliki nilai yang sama (konstan) maka disebut dengan heterokedastisitas.⁷⁴

Cara yang digunakan dalam pengujian ini adalah dengan metode analisis grafik. Metode analisis grafik dilakukan dengan mengamati *scatteplot* dimana sumbu horizontal menggambarkan nilai *predicted standardized* sedangkan sumbu vertical menggambarkan nilai *residual studentized*. Jika *scatterplot*

⁷¹ Suliyanto, *Ekonomitrika Terapan*... 69.

⁷² Husein Umar, *Desain Penelitian MSDM dan Perilaku Karyawan, Paradigma, Positifistik dan Berbasis Pemecahan Masalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 77.

⁷³ Suliyanto, *Ekonomitrika Terapan*, 69.

⁷⁴ Suliyanto, *Ekonomitrika Terapan*, 95.

membentuk pola tertentu, hal itu menunjukkan adanya masalah heteroskedastisitas pada model regresi yang dibentuk. Sedangkan jika *scatterplot* menyebar secara acak maka hal itu menunjukkan tidak terjadinya masalah heteroskedastisitas pada model regresi yang dibentuk.⁷⁵

3) Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas berarti terjadi korelasi linier yang mendekati sempurna antar lebih dari dua variabel bebas. Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi yang terbentuk ada korelasi yang tinggi atau sempurna diantara variabel bebas atau tidak. Jika dalam model regresi yang terbentuk terdapat korelasi yang tinggi atau sempurna diantara variabel maka model regresi tersebut dinyatakan mengandung gejala multikolinier.⁷⁶

Untuk mendeteksi adanya multikolinieritas dapat dilihat nilai dari tolerance dari lawannya nilai *Variance inflation factor* (VIF). Jika nilai VIF tidak lebih dari 10 maka model dinyatakan tidak mengandung multikolinieritas.

c. Analisis Regresi Berganda

Dalam analisis regresi berganda jumlah variabel bebas yang digunakan untuk memprediksi variabel tergantung lebih dari satu.⁷⁷

Analisis ini digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara

⁷⁵ Ibid, 95.

⁷⁶ Suliyanto, *Ekonomitrika Terapan*, 81.

⁷⁷ Suliyanto, *Ekonomitrika Terapan*, 53.

variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk untuk memprediksi nilai dari variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Variabel bebas dari penelitian ini adalah Pengetahuan Pajak (X_1), Sanksi Pajak (X_2), Kesadaran Wajib Pajak (X_3), dan Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah (X_4). Sedangkan variabel terikatnya adalah Efektifitas Pemungutan Pajak (Y). Rumus persamaan linier berganda sebagai berikut:⁷⁸

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + \dots + b_nX_n + e$$

Keterangan:

Y = Efektifitas Pemungutan Pajak

a = konstanta

X_1 = Pengetahuan Pajak

X_2 = Sanksi Pajak

X_3 = Kesadaran Wajib Pajak

X_4 = Tingkat kepercayaan pada pemerintah

b_1, b_2, b_3, b_4 = koefisien regresi

e = error

Untuk mengetahui serta menentukan pengaruh koefisien variabel bebas terhadap variabel terikat, maka digunakan bantuan *SPSS*. Ada beberapa uji yang akan dilakukan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

⁷⁸ Ibid, 54.

1) Koefisien Determinasi (R^2)

Pada regresi berganda, koefisien dari determinasi berganda mempresentasikan proporsi dari variasi Y yang dijelaskan oleh seperangkat variabel independen.⁷⁹ Koefien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefien determinasi adalah diantara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.⁸⁰

2) Uji t (parsial)

Uji t memiliki tujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Uji t digunakan untuk membandingkan rata-rata dua populasi dengan data yang berskala interval.⁸¹

⁷⁹ Sujoko Efferin, dkk, *Metode Penelitian Akuntansi, Mengungkap Fenomena dengan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), 217.

⁸⁰ Arfan Ikhsan, *Metodologi Penelitian Akuntansi Keperilakuan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), 249.

⁸¹ Jonathan Sarwono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006) 154.

Adapun langkah-langkah uji t adalah sebagai berikut:⁸²

1) Menentukan hipotesis

a) $H_1 : b = 0$ artinya dalam notasi hipotesis H_1 adalah pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap efektifitas pemungutan PBB P2.

$H_0 : b$ artinya dalam notasi hipotesis H_0 adalah pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap efektifitas pemungutan PBB P2.

b) $H_2 : b = 0$ artinya dalam notasi hipotesis H_2 adalah sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap efektifitas pemungutan PBB P2.

$H_0 : b$ artinya dalam notasi hipotesis H_0 adalah sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap efektifitas pemungutan PBB P2.

c) $H_3 : b = 0$ artinya dalam notasi hipotesis H_3 adalah kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap efektifitas pemungutan PBB P2.

$H_0 : b$ artinya dalam notasi hipotesis H_0 adalah kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap efektifitas pemungutan PBB P2.

⁸² Mundir, *Statistika Pendidikan* (Jember: Stain Jember-Press, 2014), 119.

d) $H_4 : b = 0$ artinya dalam notasi hipotesis H_4 adalah tingkat kepercayaan pada pemerintah berpengaruh signifikan terhadap efektifitas pemungutan PBB P2.

$H_0 : b$ artinya dalam notasi hipotesis H_0 adalah tingkat kepercayaan pada pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap efektifitas pemungutan PBB P2.

2) Menentukan derajat kepercayaan 5% ($\alpha = 0,05$) dari t hitung dan t table.

3) Menentukan t hitung dengan rumus:

$$t_{hitung} = r \frac{\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan:

r = nilai koefisien korelasi

n = jumlah sampel

4) Menentukan t tabel (diambil dari hasil table distribusi t pada $\alpha = 5\%$). Rumus $t_{tabel} = N - k$

5) Membuat kesimpulan:

Kriteria uji t :

- a) Jika nilai $\text{sig} < 0,05$, nilai t hitung $> t$ table, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, menyatakan bahwa variabel independen (X) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y).
- b) Jika nilai $\text{sig} > 0,05$, nilai t hitung $< t$ table, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, menyatakan bahwa variabel

independen (X) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y).

3) Uji F (Simultan)

Uji pengaruh simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen. Hasil *F-test* ini pada *output* SPSS dapat dilihat pada table ANOVA. Hasil *F-test* menunjukkan variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen jika *P-value* lebih kecil dari *level of significant* yang ditentukan, atau *F*hitung lebih besar dari *F*tabel.⁸³ Adapun langkah-langkah uji F adalah sebagai berikut:⁸⁴

a) Menentukan Hipotesis

$H_5 : \beta_1 : \beta_2 : \beta_3 : \beta_4 = 0$ artinya secara simultan ada pengaruh signifikan antara variabel independen yaitu *tax payer factors* yang terdiri dari pengetahuan pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan tingkat kepercayaan pada pemerintah terhadap efektifitas pemungutan PBB P2.

$H_0 : \beta_1 : \beta_2 : \beta_3 : \beta_4 = 0$ artinya secara simultan tidak ada pengaruh signifikan antara variabel independen yaitu *tax payer factors* yang terdiri dari pengetahuan pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan tingkat kepercayaan pada pemerintah terhadap efektifitas pemungutan PBB P2.

⁸³ Imam Ghozali, *Aplikasi SPSS*. (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2006), 127

⁸⁴ Riduwan dan Sunarto, *Pengantar Statistik...* 86.

b) Menentukan tingkat signifikansi dengan menggunakan $\alpha = 5\%$
 ($\alpha = 0,05$) dari F_{hitung} dan F_{tabel} .

c) Menentukan F_{hitung} dengan rumus :

$$F = \frac{R^2/(k-1)}{1-R^2/(n-k)}$$

Keterangan:

F = Nilai F_{hitung}

R^2 = Koefisien determinasi

k = jumlah Variabel

n = Jumlah Pengamatan (ukuran sampel).⁸⁵

d) Menentukan F_{tabel} dengan $\alpha = 5\%$ dengan tingkan keyakinan
 95%

e) Membuat kesimpulan

1) Jika nilai $\text{sig} < 0,05$, nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan
 H_a diterima, menyatakan bahwa masing-masing variabel
 independen secara simultan mempunyai pengaruh signifikan
 terhadap variabel dependen.

2) Jika nilai $\text{sig} > 0,05$, nilai $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 diterima
 dan H_a ditolak, menyatakan bahwa masing-masing variabel
 independen secara simultan tidak mempunyai pengaruh
 signifikan terhadap variabel dependen.

⁸⁵ Suliyanto, *Ekonomitrika Terapan...* 45.

K. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan digunakan untuk memberikan gambaran secara global tentang isi penelitian ini dari tiap bab, sehingga akan mempermudah dalam melakukan tinjauan terhadap isinya. Format penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif, naratif, bukan seperti daftar isi. Disusun suatu sistematika yang sesuai dengan urutan-urutan yang ada dalam proposal. Sistematika pembahasan dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara singkat. Sistematika tersebut terdiri dari:

Bab I Pendahuluan

Menguraikan tentang latar belakang yang berisi mengenai alasan penulis melakukan penelitian tentang pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan kepercayaan pada pemerintah terhadap efektifitas pemungutan PBB-P2, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian (variabel penelitian dan indikator variabel), definisi operasional, hipotesis, metode penelitian (pendekatan dan jenis penelitian, populasi dan sampel, tehnik dan instrumen pengumpulan data, analisis data), dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Kepustakaan

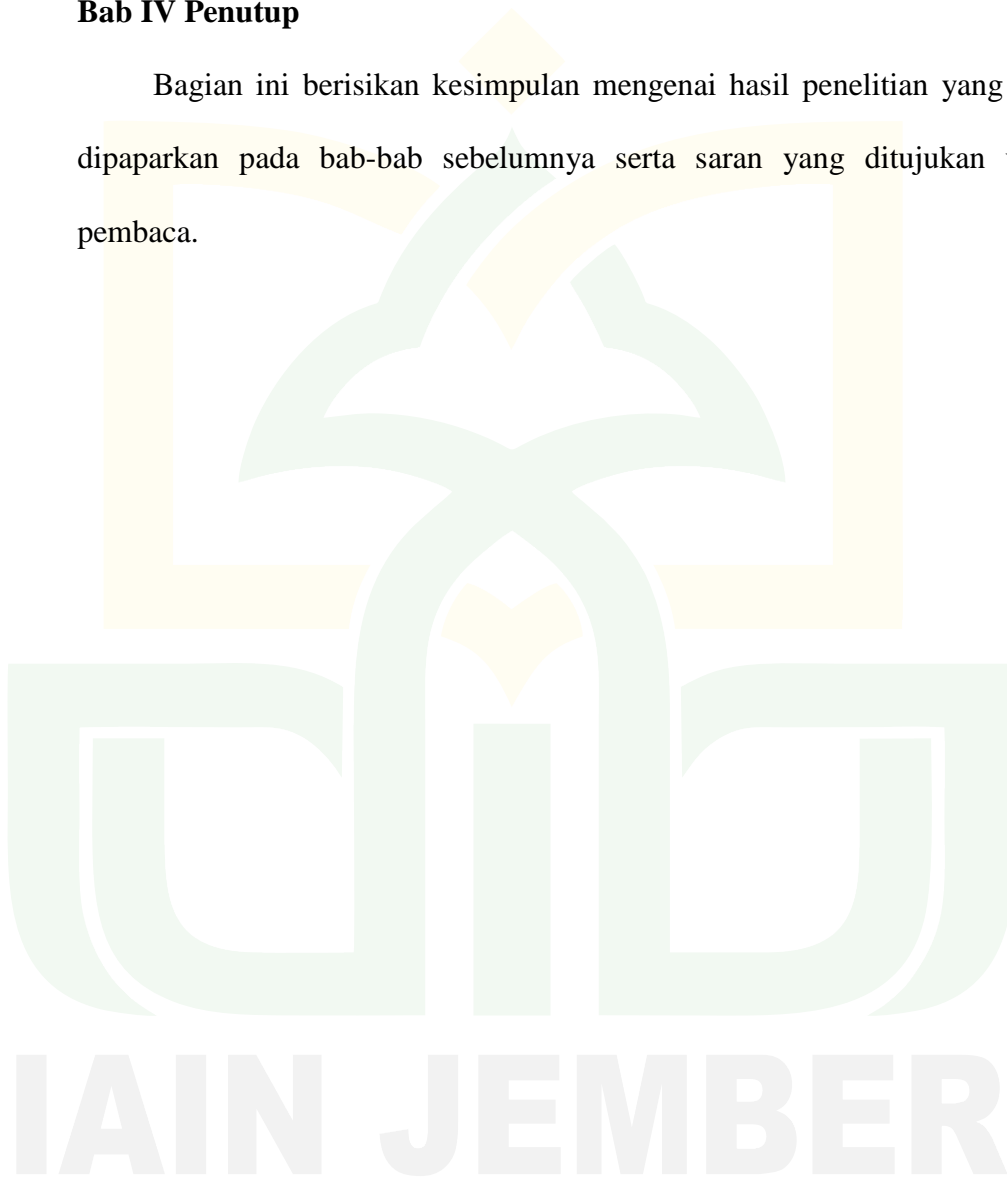
Terdiri dari penelitian terdahulu dengan memaparkan hasil-hasil penelitian, serta kajian teori yang berisikan terkait dengan pengetahuan pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, tingkat kepercayaan pada pemerintah dan efektifitas pemungutan PBB-P2.

Bab III Penyajian Data dan Analisis

Bab ini membahas mengenai gambaran obyek penelitian, penyajian data, analisis dan pengujian hipotesis, serta pembahasan.

Bab IV Penutup

Bagian ini berisikan kesimpulan mengenai hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya serta saran yang ditujukan untuk pembaca.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Terdapat penelitian yang dilakukan sebelumnya yang hampir sama dengan penelitian ini, antara lain :

1. **“Pengaruh *Tax Payer Factors* Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Restoran (Studi Empiris di Kota Padang)”**. Tahun 2014. Skripsi ini ditulis oleh Iftahul Rezki dari Universitas Negeri Padang, Padang. Hasil penelitian dari 192 responden, menunjukkan bahwa kesadaran perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap keberhasilan penerimaan pajak restoran. Sedangkan tingkat pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh positif terhadap keberhasilan penerimaan pajak restoran.
2. **“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Kalidengen, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017”**. Tahun 2017. Jurnal ini ditulis oleh Yuni Setyowati dari Universitas Negeri Yogyakarta. Hasil penelitian dari 90 responden, menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

3. **“Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Dan Hukum, Serta Nasionalisme Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pbb-P2 (Studi Pada Wajib Pajak PBB-P2 di Kota Banjar)”**. Tahun 2017. Penelitian ini ditulis oleh Apriani Purnamasari Umi, Pratiwi Sukirman dari Universitas Jenderal Soedirman. Hasil penelitian dari 100 responden, menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak, sanksi pajak, dan nasionalisme berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.
4. **“Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Efektifitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Kota Palangka Raya”**. Tahun 2014. Jurnal ini ditulis oleh Cristi Devi Darnita dan Yenni Mangoting dari Universitas Kristen Petra. Hasil penelitian dari 200 reponden, menunjukkan bahwa terdapat Sembilan faktor yang mempengaruhi efektifitas pemungutan PBBP2 di Kota Palangka Raya yaitu, faktor Pengetahuan wajib pajak, cara pemungutan pajak, asas manfaat pajak, efektifitas peran pihak ketiga, kepatuhan wajib pajak, e-system perpajakan, sosialisasi berkesinambungan, pelayanan prima, dan peraturan yang lengkap.
5. **“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Kpp Pratama Cilacap Tahun 2018”**. Tahun 2018. Skripsi ini ditulis oleh Titis Wahyu Adi dari Universitas Negeri Yogyakarta. Hasil penelitian

dari 100 responden, menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Cilacap tahun 2018.

6. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang)”

Tahun 2014. Skripsi ini ditulis oleh Bona Imelda dari Universitas Diponegoro. Hasil penelitian dari 100 responden, menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman perpajakan, pelayanan fiskus, pembangunan fasilitas publik, dan tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Sedangkan persepsi atas efektifitas sistem perpajakan, konflik pajak, dan sanksi pajak tidak memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

7. “Pengaruh *Self Assessment System* Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jember”

Tahun 2018. Skripsi ini ditulis oleh Nailul Ilmi Amalia dari IAIN Jember. Hasil penelitian dari 92 responden, menunjukkan bahwa *self assessment system* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan pelayanan pajak secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

8. “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Norma Sosial, Kepercayaan Pada Pemerintah Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Pada Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar)”. Tahun

2017. Skripsi ini ditulis oleh Febriani Ramadhani Juwanti dari Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Hasil penelitian dari 100 responden, menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Variabel kesadaran wajib pajak, norma sosial, kepercayaan pada pemerintah dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

9. “Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Pada Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan”. Tahun 2016. Jurnal ini ditulis oleh I Gede Prayuda

Budhiartama dan I Ketut Jati dari Universitas Udayana Bali. Hasil penelitian dari 100 responden, menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak tentang sikap, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak melakukan pembayaran pajak pada Dinas Pendapatan Denpasar.

10. “Pengaruh Pelayanan dan Pemanfaatan Fasilitas “Pajak Online” Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Jember”. Tahun 2017. Skripsi ini ditulis oleh Santi Aji Ambarwati dari

IAIN Jember. Hasil penelitian dari 100 responden, menunjukkan bahwa Pelayanan dan Pemanfaatan Fasilitas “Pajak Online” berpengaruh terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.

Tabel 2.1
Perbedaan Dan Persamaan Terhadap Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1	Iftahul Rezki (2014)	<ul style="list-style-type: none"> - Variabel bebas yang digunakan yaitu menekankan pada <i>tax payer factors</i>. - Salah satu variabel bebas yang digunakan yaitu kesadaran wajib pajak. 	<ul style="list-style-type: none"> - Variabel terikat yang digunakan yaitu menekankan penerimaan pajak. - Tempat penelitian - Jenis pajak yang menjadi fokus penelitian
2	Yuni Setyowati (2017)	<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan variabel bebas yaitu pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak - Tempat penelitian yaitu berada didesa 	<ul style="list-style-type: none"> - Variabel terikat yang digunakan lebih memfokuskan pada kepatuhan wajib pajak
3	Apriani, Purnamasari Umi, Pratiwi Sukirman (2017)	<ul style="list-style-type: none"> - Variabel bebas yang digunakan yaitu sanksi pajak, tingkat kepercayaan pada pemerintah. - Menggunakan analisis regresi berganda. - Materi yang digunakan tentang teori Atribusi 	<ul style="list-style-type: none"> - Variabel terikat yang digunakan yaitu menekankan pada kepatuhan wajib pajak.
4	Cristi Devi Darnita dan Yenni Mangoting (2014)	<ul style="list-style-type: none"> - Variabel terikat yang digunakan yaitu efektifitas pemungutan PBB-P2. - Materi yang digunakan tentang perpajakan 	<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan Sembilan variabel bebas. - Tidak menggunakan teori atribusi
5	Titis Wahyu Adi (2018)	<ul style="list-style-type: none"> - Variabel bebas yang digunakan yaitu pengetahuan pajak, 	<ul style="list-style-type: none"> - Variabel terikat yang digunakan lebih memfokuskan pada

		<p>sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan analisis regresi berganda 	<p>kepatuhan wajib pajak</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tempat penelitian
6	Bona Imelda (2014)	<ul style="list-style-type: none"> - Variabel bebas yang digunakan yaitu pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak - Menggunakan teori Atribusi 	<ul style="list-style-type: none"> - Variabel terikat yang digunakan lebih memfokuskan pada kepatuhan wajib pajak. - Tempat penelitian
7	Nailul Ilmi Amalia (2018)	<ul style="list-style-type: none"> - Materi yang digunakan mengenai pajak. - Menggunakan analisis regresi berganda 	<ul style="list-style-type: none"> - Variabel bebas dan variabel terikat yang digunakan - Tempat penelitian
8	Febriani Ramadhani Juwanti (2017)	<ul style="list-style-type: none"> - Variabel bebas yang digunakan yaitu pengetahuan pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak dan kepercayaan pada pemerintah - Menggunakan analisis regresi berganda 	<ul style="list-style-type: none"> - Variabel terikat yang digunakan yaitu lebih memfokuskan pada kepatuhan wajib pajak - Menggunakan variabel bebas lain yaitu norma social
9	I Gede Prayuda Budhiartama dan I Ketut Jati (2016)	<ul style="list-style-type: none"> - Variabel bebas yang digunakan yaitu pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak. 	<ul style="list-style-type: none"> - Variabel terikat yang digunakan lebih memfokuskan pada kepatuhan membayar pajak.
10	Santi Aji Ambarwati (2017)	<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan Analisis Regresi Berganda. - Materi yang digunakan tentang pajak. 	<ul style="list-style-type: none"> - Variabel terikat yang digunakan lebih memfokuskan pada Tingkat Kepatuhan wajib pajak.

B. Kajian Teori

1. Teori Atribusi

Atribusi merupakan salah satu proses pembentukan kesan. Atribusi mengacu pada bagaimana orang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri. Atribusi adalah proses di mana orang menarik kesimpulan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku orang lain.

Teori Atribusi memandang individu sebagai psikologi amatir yang mencoba memahami sebab-sebab yang terjadi pada berbagai peristiwa yang dihadapinya. Teori atribusi mencoba menemukan apa yang menyebabkan apa, atau apa yang mendorong siapa melakukan apa. Respon yang kita berikan pada suatu peristiwa bergantung pada interpretasi kita tentang peristiwa itu.⁸⁶

Pada dasarnya, teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada dibawah kendali pribadi atau individu itu sendiri atau berasal dari faktor internal seperti ciri kepribadian, kesadaran, dan kemampuan. Hal ini merupakan atribusi internal. Sedangkan, perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar atau dari faktor eksternal seperti peralatan atau pengaruh sosial dari orang lain, artinya

⁸⁶ Winda Kurnia Fikriningrum, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari)*. Skripsi, Semarang: Universitas Diponegoro, 2012, 10.

individu akan terpaksa berperilaku karena situasi, ini merupakan atribusi eksternal.⁸⁷

Alasan pemilihan teori ini adalah tingkat efektifitas pemungutan pajak terkait dengan persepsi wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai sesuatu sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal dari orang tersebut. Jadi teori atribusi sangat relevan untuk menerangkan maksud tersebut.

2. Tax Payer Factors

Tax payer factors adalah faktor-faktor yang melekat pada wajib pajak dalam membayar pajak.⁸⁸ Teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri atau berasal dari faktor internal seperti ciri kepribadian, kesadaran, dan pengetahuan. Hal ini merupakan atribusi internal.

Sedangkan, perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar atau dari faktor eksternal seperti peralatan atau pengaruh sosial, sanksi, kepercayaan dan lain-lain. Dalam hal ini artinya

⁸⁷ Stephen P. Robbins, *Perilaku Organisasi Konsep, Kontroversi, dan Aplikasi* (Jakarta: Prenhallindo, 1996), 127.

⁸⁸ Iftahul Rezki, *Pengaruh Tax Payer Factors terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Restoran (Studi Empiris di Kota Padang)*. Skripsi. Padang: Universitas Negeri Padang, 2014, 1.

individu akan terpaksa berperilaku karena situasi, ini merupakan atribusi eksternal.⁸⁹

Berdasarkan hal tersebut maka *tax payer factors* menurut Robbins yaitu kepribadian, kesadaran, kemampuan atau pengetahuan, sanksi, kepercayaan, peralatan atau pengaruh sosial. Dalam hal ini, peneliti memfokuskan penelitiannya pada beberapa faktor yaitu pengetahuan pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan tingkat kepercayaan kepada pemerintah.

3. Pajak Bumi dan Banguna Perdesaan Perkotaan (PBB-P2)

a. Pengertian PBB P2

Sejak berlakunya undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tanggal 15 September 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, wewenang untuk memungut pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan diserahkan ke pemerintah kabupaten atau kota. Penyerahan PBB-P2 kepada pemerintah kabupaten/ kota dimulai 1 januari 2011 dan paling lambat 1 januari 2014.⁹⁰

PBB sektor perdesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, pertambangan. Sedangkan untuk sektor

⁸⁹ Ibid, 47.

⁹⁰ Mardiasmo, *Perpajakan*. 406.

usaha perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan usaha tertentu lainnya masih dipungut oleh pemerintah pusat.⁹¹

b. Objek PBB-P2

Objek PBB perdesaan dan perkotaan adalah bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah jalan lingkungan, jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, dan lain-lain.⁹²

Sedangkan yang tidak dikenakan PBB Perdesaan Perkotaan adalah objek pajak yang:⁹³

- 1) Digunakan oleh pemerintah dan daerah untuk penyelenggaraan pemerintah.
- 2) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.
- 3) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu.
- 4) Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah Negara yang belum dibebani suatu hak.

⁹¹ Mardiasmo, *Perpajakan*, 406.

⁹² *Ibid*, 407

⁹³ Mardiasmo, *Perpajakan*, 407.

- 5) Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik
- 6) Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

c. Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Subjek PBB perdesaan dan perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/ atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki menguasai, memperoleh manfaat atas bangunan. Wajib pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan/ atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/ atau memiliki, menguasai, memperoleh manfaat atas bangunan.⁹⁴

d. Mekanisme PBB Perdesaan Perkotaan

PBB P2 dikenakan setiap tahun. PBB terutang dihitung menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 januari. Tempat PBB terutang adalah wilayah daerah yang meliputi letak objek pajak. Pendataan terhadap PBB dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP). SPOP harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditanda tangani dan disampaikan kepada kepala daerah yang

⁹⁴ Mardiasmo, *Perpajakan*. 407.

wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, selambat-lambatnya 30 hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak.⁹⁵

4. Efektifitas Pemungutan Pajak

a. Pengertian Efektifitas

Efektifitas adalah konteks perilaku organisasi merupakan hubungan antar produksi, kualitas, efisien, fleksibelitas, kepuasan, sifat keunggulan dan pengembangan.⁹⁶ Efektivitas suatu pelaksanaan kegiatan pemungutan PBB-P2 tergantung kepada sejauh mana kegiatan tersebut mencapai tujuannya.⁹⁷

b. Teori Pemungutan Pajak

Terdapat beberapa teori pemungutan pajak, yang secara singkat dapat diuraikan dalam penjelasan di bawah ini:⁹⁸

1) Teori Asuransi

Teori ini menyatakan bahwa pajak diibaratkan sebagai suatu premi asuransi yang harus dibayar oleh setiap orang karena setiap orang mendapatkan perlindungan dan hak-haknya dari negara.

2) Teori Daya Pikul

Berdasarkan teori ini, setiap orang wajib membayar pajak sesuai dengan daya pikul masing-masing. Daya pikul adalah

⁹⁵ Ibid, 409.

⁹⁶ Fajar Nuansa, *Efektifitas Pemungutan Pajak Penggunaan Energi Listrik Atas Listrik Yang Dihasilkan Oleh Badan Usaha Milik Swasta PT. X (Studi Atas DPPKA Kabupaten Bekasi)*. Skripsi, Jakarta: Universitas Indonesia, 2012, 21.

⁹⁷ Mustafa Hasbar dan Agung Wijaya, *Efektifitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) Dengan Pendekatan Strategy SWOT Analysis Di Kabupaten Enrekang*. Magister Administrasi Publik STISIP Muhammadiyah Rappang Sidenreng Rappang, Indonesia.

⁹⁸ Tim Edukasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak, *Materi Terbuka Kesadaran Pajak untuk Perguruan Tinggi ...*, 82.

kekuatan seseorang untuk memikul suatu beban dari apa yang tersisa, setelah seluruh penghasilannya dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran yang mutlak untuk kehidupan primer diri sendiri dan keluarganya.

3) Teori Kepentingan

Menurut teori ini, besarnya pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan besarnya kepentingan Wajib Pajak yang dilindungi pemerintah. Semakin besar kepentingan yang dilindungi, maka semakin besar pula pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak.

4) Teori Daya Beli

Berdasarkan teori ini, pajak diibaratkan sebagai pompa yang menyedot daya beli seseorang atau anggota masyarakat yang kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat untuk kesejahteraan bersama.

5) Teori Kewajiban Pajak Mutlak

Teori ini didasarkan pada organ theory dari Otto von Gierke yang menyatakan bahwa negara merupakan suatu kesatuan yang di dalamnya setiap warga negara terikat. Tanpa ada organ atau lembaga tersebut, individu tidak mungkin dapat hidup. Lembaga membebani setiap anggota masyarakatnya dengan kewajiban-kewajiban, yang antara lain kewajiban membayar pajak, karena lembaga tersebut memberi hidup kepada warganya. Dengan demikian, pemungutan pajak untuk negara dapat dibenarkan.

Secara akademik, dari 5 (lima) teori tersebut, terdapat 3 (tiga) teori yang logis diterima sebagai landasan *scientific* bahwa pemungutan pajak dapat dibenarkan, yaitu teori daya pikul, teori daya beli, dan teori kewajiban pajak mutlak, yang ketiganya bersifat universal dalam konteks pemungutan pajak oleh negara.

c. Asas Pemungutan Pajak

Adam Smith mengemukakan 4 (empat) landasan moral (*the four maxims*) dalam pemungutan pajak, antara lain:

- 1) Asas *equity*, yakni sistem perpajakan dapat berhasil apabila masyarakat yakin bahwa pajak yang dipungut pemerintah telah dikenakan secara adil dan setiap orang membayar sesuai dengan kemampuan keuangannya. Hal ini dimaknai bahwa, beban pajak ditanggung bersama oleh masyarakat suatu negara sesuai dengan asas keadilan dan pemerataan. Masyarakat yang tingkat pendapatannya tinggi harus membayar pajak lebih besar daripada masyarakat yang berpendapatan rendah.
- 2) Asas *certainty*, yakni asas kepastian (*certainty*) yang menekankan bahwa harus ada kepastian baik bagi petugas pajak maupun semua Wajib Pajak dan seluruh masyarakat mengenai siapa yang harus dikenakan pajak, apa saja yang menjadi objek pajak, serta besaran jumlah pajak yang harus dibayar, serta bagaimana prosedur pembayarannya.

3) Asas *convenience*, yakni asas kenyamanan yang menekankan bahwa pembayaran pajak hendaklah dimungkinkan pada saat menyenangkan seperti saat menerima penghasilan/gaji, saat menerima bunga deposito atau saat menerima dividen dari saham yang dimilikinya atau sedang mendapat proyek, selain itu cara pembayarannya dipermudah, misalnya prosedurnya dibuat sederhana.

d. Pemungut Pajak (Fiskus)

Pemungutan pajak harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Pada hakikatnya yang memikul beban pajak adalah rakyat. Pemungutan pajak yang efektif sangat ditentukan dari petugas pemungutnya atau fiskus. Pemungut pajak yang berhubungan dengan masyarakat pembayar pajak harus memiliki intelektualitas tinggi, terlatih, bermoral.⁹⁹ Selain itu kualitas pelayananyang dilakukan oleh pemungut pajak sangat penting dalam efektifitas pemungutan pajak. Pemungutan pajak yang efektif akan meningkatkan:¹⁰⁰

- 1) Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak
- 2) Kepercayaan terhadap pemerintah serta pemungut pajak
- 3) Produktifitas penerimaan pajak

⁹⁹ Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Indonesia*...29.

¹⁰⁰ Ibid, 28.

BAB III

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah Desa Watukebo Kec. Blimbingsari

Watukebo adalah sebuah nama desa yang terletak di wilayah Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur. Desa Watukebo dulunya merupakan bagian dari kecamatan Rogojampi. Kemudian pada bulan Januari 2017 Kecamatan Blimbingsari diresmikan menjadi kecamatan sendiri. Maka desa Watukebo masuk ke dalam wilayah kecamatan Blimbingsari. Secara umum batas-batas administrasi desa watukebo meliputi:

- a. Disebelah utara desa Watukebo dibatasi oleh Desa Karangbendo dan Desa Blimbingsari.
- b. Sebelah timur dibatasi oleh Desa Patoman dan Selat Bali.
- c. Disebelah selatan dibatasi oleh desa Bomo dan desa Gintangan.
- d. Sedangkan disebelah barat dibatasi oleh desa Kaotan dan Rogojampi.

Desa Watukebo sendiri memiliki 6 dusun yaitu:

- a. Dusun krajan
- b. Dusun patoman
- c. Dusun gepuro
- d. Dusun glondong
- e. Dusun amerthasari

f. dusun gumuk agung.

Jumlah penduduk desa Watukebo \pm 11.869 jiwa, dengan perincian penduduk seluruhnya yaitu 5.853 penduduk laki-laki, 6.016 penduduk perempuan.

2. Keadaan Wilayah / Luas Desa

a. Luas wilayah desa watukebo adalah 1132 Ha, terdiri dari:

- 1) Tanah sawah seluas 494 Ha.
- 2) Tanah Ladang Tefal 453 Ha.
- 3) Tanah Perumahan 32 Ha.
- 4) Tanah Perkebunan Negara – Ha
- 5) Tanah kuburan 5 Ha.
- 6) Tanah tambak 41,2 Ha.
- 7) Tanah lain-lain 96,8 Ha.

b. Desa watukebo tergolong wilayah yang berdataran sedang, dengan suhu rata-rata 26° s/d 32° C.

c. Orbitasi (jarak dari pusat pemerintahan):

- 1) Jarak dari kantor desa kecamatan 4 Km
- 2) Jarak dari kantor desa kabupaten 9 Km
- 3) Jarak dari kantor desa provinsi 300 Km

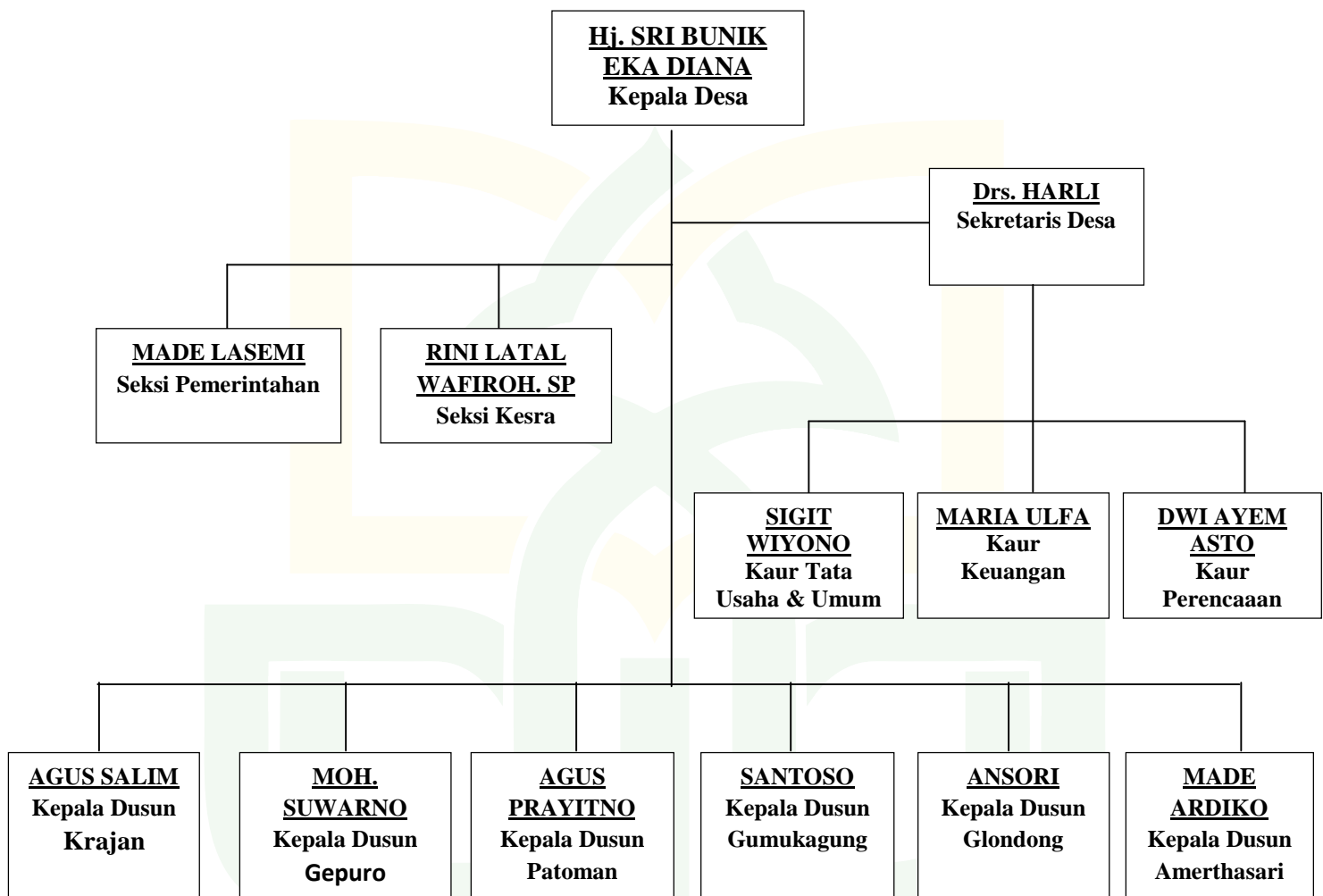
d. Desa watukebo kecamatan Blimbingsari terletak diposisi:

- 1) Utara $9,19^{\circ}$ LS
- 2) Selatan $36,60^{\circ}$ LS
- 3) Barat $114,21^{\circ}$ BT

4) Timur 32,65⁰ BT

3. Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa

Watukebo



Sumber: Jurnal Kantor Desa Watukebo, 2019.

B. Penyajian Data

Pada penelitian ini akan dijelaskan secara deskriptif tentang penelitian pengaruh *tax payer factors* terhadap efektifitas pemungutan PBB-P2 (Studi Desa Watukebo Kec. Blimbingsari Kab. Banyuwangi). Dalam penelitian ini peneliti menyebarkan kuesioner sebanyak 98

kuesioner. Dengan skor penilaian pernyataan responden sebagai berikut:

1. Sangat setuju (SS) dengan skor 5
2. Setuju (S) dengan skor 4
3. Kurang Setuju (KS) dengan skor 3
4. Tidak Setuju (TS) dengan skor 2
5. Sangat Tidak Setuju (STS) dengan skor 1

Hasil pengisian kuesioner yang dilakukan oleh responden adalah sebagai berikut:

1. Kepercayaan Pada Pemerintah sebagai variabel Y

Tanggapan para wajib pajak tentang efektifitas pemungutan PBB-P2 dalam hal meningkatkan penerimaan pajak di Desa Watukebo.

Tabel 3.1
Pernyataan Responden Terhadap Variabel Y

Pernyataan	SS	S	KS	TS	STS	Total
1	18	79	1	0	0	98
2	11	67	20	0	0	98
3	8	63	25	2	0	98
4	7	64	25	2	0	98
5	6	60	27	5	0	98

Sumber: Data olahan kuesioner, 2019.

2. Pengetahuan pajak sebagai variabel X₁

Tanggapan para wajib pajak tentang pengetahuan pajak di Desa Watukebo.

Tabel 3.2
Pernyataan Responden Terhadap Variabel X₁

Pernyataan	SS	S	KS	TS	STS	Total
6	42	56	0	0	0	98
7	14	84	0	0	0	98
8	48	50	0	0	0	98
9	50	48	0	0	0	98
10	24	74	0	0	0	98

Sumber: Data olahan kuesioner, 2019.

3. Sanksi Pajak sebagai variabel X₂

Tanggapan para wajib pajak tentang sanksi pajak di Desa Watukebo.

Tabel 3.3
Pernyataan Responden Terhadap Variabel X₂

Pernyataan	SS	S	KS	TS	STS	Total
11	16	78	2	2	0	98
12	6	57	27	8	0	98
13	9	72	15	2	0	98
14	6	85	7	0	0	98
15	5	54	22	15	2	98

Sumber: Data olahan kuesioner, 2019.

4. Kesadaran wajib pajak sebagai variabel X₃

Tanggapan para wajib pajak tentang kesadaran wajib pajak di Desa Watukebo.

Tabel 3.4
Pernyataan Responden Terhadap Variabel X₃

Pernyataan	SS	S	KS	TS	STS	Total
16	64	34	0	0	0	98
17	58	39	0	1	0	98
18	56	39	1	2	0	98
19	58	39	0	1	0	98
20	57	41	0	0	0	98

Sumber: Data olahan kuesioner, 2019.

5. Tingkat kepercayaan pada pemerintah sebagai variabel X₄

Tanggapan para wajib pajak tentang tingkat kepercayaan pada pemerintah di Desa Watukebo.

Tabel 3.5
Pernyataan Responden Terhadap Variabel X₄

Pernyataan	SS	S	KS	TS	STS	Total
21	10	80	8	0	0	98
22	9	76	11	2	0	98
23	3	51	37	7	0	98
24	5	54	39	0	0	98
25	5	72	21	0	0	98

Sumber: Data olahan kuesioner, 2019.

6. Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan (PBB-P2) yang ada di Desa Watukebo sebanyak 98 orang. Uraian dari deskripsi karakteristik responden diuraikan sebagai berikut:

- a. Jumlah responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini berdasarkan jenis kelamin.

Tabel 3.6
Jenis Kelamin Responden

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	44
2	Perempuan	54
Jumlah		98

Sumber: Data olahan kuesioner, 2019.

Dari tabel diatas menunjukkan responden dalam penelitian ini sebagian besar berjenis kelamin perempuan yaitu sebesar 54 responden.

- b. Jumlah responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini berdasarkan usia responden.

Tabel 3.7
Usia Responden

No.	Usia	Jumlah
1	21-30	6
2	31-40	24
3	41-50	30
4	51-60	30
5	61-70	8
Jumlah		98

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa responden yang berpartisipasi sebagian besar berusia 31 sampai dengan usia 40 tahun dan usia 41 tahun sampai dengan 50 tahun. Masing-masing berjumlah 30 responden. Dengan jumlah keseluruhan responden sebanyak 98 responden.

- c. Jumlah responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini berdasarkan tingkat pendidikan.

Tabel 3.8
Tingkat Pendidikan Responden

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tidak sekolah	1
2	SD	65
3	SMP	13
4	SMA	15
5	Diploma	0
6	Sarjana (S1)	4
7	Magister (S2)	0
Jumlah		98

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa responden yang berpartisipasi sebagian besar memiliki tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) yaitu sebanyak 65 responden.

d. Jumlah responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini berdasarkan jenis pekerjaan.

Tabel 3.9
Jenis Pekerjaan Responden

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Karyawan	2
2	Tani	29
3	PNS	2
4	Wiraswasta	59
5	Lainnya	6
Jumlah		98

Sumber: Data diolah

Dari tabel diatas menunjukkan responden dalam penelitian ini sebagian besar memiliki pekerjaan wiraswasta yaitu sebanyak 59 responden.

e. Lokasi pengambilan sampel

Tabel 3.10
Lokasi Pengambilan Sampel

No.	Lokasi Pengambilan Sampel	Jumlah
1	Dusun Krajan	16
2	Dusun Gepuro	17
3	Dusun Patoman	16
4	Dusun Amerthasari	17
5	Dusun Glondong	16
6	Dusun Gumuk Agung	16
Jumlah		98

Sumber: Data diolah

Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah responden yang berpartisipasi menurut lokasi pengambilan sampel, dimana penelitian ini dilakukan dalam satu desa, yang dalam desa tersebut terdapat 6 dusun. Dalam hal ini peneliti menyebarkan kuesioner sebanyak 98 wajib pajak yang mengisi kuesioner tersebut.

C. Analisis dan Pengujian Hipotesis

1. Uji Intrumen Penelitian

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner tersebut. Suatu instrument yang valid mempunyai validitas tinggi dan sebaliknya bila validitasnya rendah maka instrument tersebut kurang valid. Sebuah instrument yang valid apabila mampu mengukur apa yang hendak diukur/ diinginkan.

Adapun rumusan yang digunakan untuk menguji tingkat validitas instrument dalam penelitian ini yaitu menggunakan rumus korelasi. Adapun korelasi yang dipakai pada penelitian ini adalah korelasi *product moment*. Hasil r_{hitung} kita bandingkan dengan r_{tabel} dimana $df = n - 2$ dengan signifikansi 5%. Jika $r_{tabel} < r_{hitung}$, maka valid dan sebaliknya. Dapat dilihat pada tabel *product moment* pada SPSS untuk mengujinya.

Tabel 3. 11
Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian

Variabel	Butir Pertanyaan	r _{hitung}	r _{tabel}	Keterangan
Pengetahuan Pajak (X1)	X1.1	0,747	0,1986	Valid
	X1.2	0,643		Valid
	X1.3	0,800		Valid
	X1.4	0,829		Valid
	X1.5	0,688		Valid
Sanksi Pajak (X2)	X2.1	0,697	0,1986	Valid
	X2.2	0,849		Valid
	X2.3	0,778		Valid
	X2.4	0,591		Valid
	X2.5	0,804		Valid
Kesadaran Wajib Pajak (X3)	X3.1	0,780	0,1986	Valid
	X3.2	0,813		Valid
	X3.3	0,859		Valid
	X3.4	0,859		Valid
	X3.5	0,912		Valid
Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah (X4)	X4.1	0,590	0,1986	Valid
	X4.2	0,611		Valid
	X4.3	0,780		Valid
	X4.4	0,794		Valid
	X4.5	0,789		Valid
Efektifitas Pemungutan PBB-P2 (Y)	Y.1	0,468	0,1986	Valid
	Y.2	0,776		Valid
	Y.3	0,896		Valid
	Y.4	0,855		Valid
	Y.5	0,755		Valid

Sumber: Data olahan SPSS, 2019.

Nilai-nilai dari uji validitas dengan *product moment* tersebut dibandingkan dengan nilai r_{tabel} dimana $df = n - 2 = 96$. Dengan n (jumlah responden) sebanyak 98 responden dengan tingkat signifikansi 5 %, didapat nilai r_{tabel} sebesar 0,1986. Pengambilan keputusan validitas adalah apabila nilai r_{hitung} lebih

besar dari nilai r_{tabel} , maka butir pertanyaan tersebut valid. Dengan demikian peneliti dapat melakukan kejejang selanjutnya.

b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa sesuatu instrument dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrument tersebut sudah dianggap baik. Hasil penelitian yang reliabel bila terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Alat ukur untuk mengukur reabilitas adalah *Cronbach Alpha*. Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai $alpha > 0,60$. Untuk melihat reliabilitas masing-masing instrument dapat juga dilihat dengan menggunakan koefisien *Cronbach Alpha* sebagai berikut:

a. Uji Reliabilitas Pengetahuan Pajak (X1)

Tabel 3.12
Hasil Uji Reliabilitas Pengetahuan Pajak (X1)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.797	5

Sumber: Hasil Olahan Data SPSS, 2019

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai Cronbach Alpha sebesar $0,797 > 0,60$, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan dari pengetahuan pajak (X1) dalam penelitian ini dinyatakan reliabel.

b. Uji Reliabilitas Sanksi Pajak

Tabel 3.13
Hasil Uji Reliabilitas Sanksi Pajak (X2)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.787	5

Sumber: Hasil Olahan Data SPSS,2019.

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai *Cronbach Alpha* sebesar $0,787 > 0,60$, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan dari sanksi pajak (X2) dalam penelitian ini dinyatakan reliabel.

c. Uji Reliabilitas Kesadaran Wajib Pajak

Tabel 3.14
Hasil Uji Reliabilitas Kesadaran Wajib Pajak (X3)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.896	5

Sumber: Hasil Olahan Data SPSS,2019.

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai *Cronbach Alpha* sebesar $0,896 > 0,60$, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan dari kesadaran wajib pajak (X3) dalam penelitian ini dinyatakan reliabel.

d. Uji Reliabilitas Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah

Tabel 3.15
Hasil Uji Reliabilitas Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah (X4)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.758	5

Sumber: Hasil Olahan Data SPSS, 2019.

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai *Cronbach Alpha* sebesar $0,758 > 0,60$, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan dari tingkat kepercayaan pada pemerintah (X4) dalam penelitian ini dinyatakan reliabel.

e. Uji Reliabilitas Efektifitas Pemungutan PBB-P2

Tabel 3.16
Hasil Uji Reliabilitas Efektifitas Pemungutan PBB-P2

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.818	5

Sumber: Hasil Olahan Data SPSS, 2019.

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai *Cronbach Alpha* sebesar $0,818 > 0,60$, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan dari efektifitas pemungutan PBB-P2 (Y) dalam penelitian ini dinyatakan reliabel.

2. Uji Asumsi Klasik

Untuk mendapatkan nilai pemeriksaan yang efisien dari suatu persamaan regresi linier berganda maka perlu dilakukan pengujian dengan memenuhi persyaratan asumsi klasik yang meliputi:

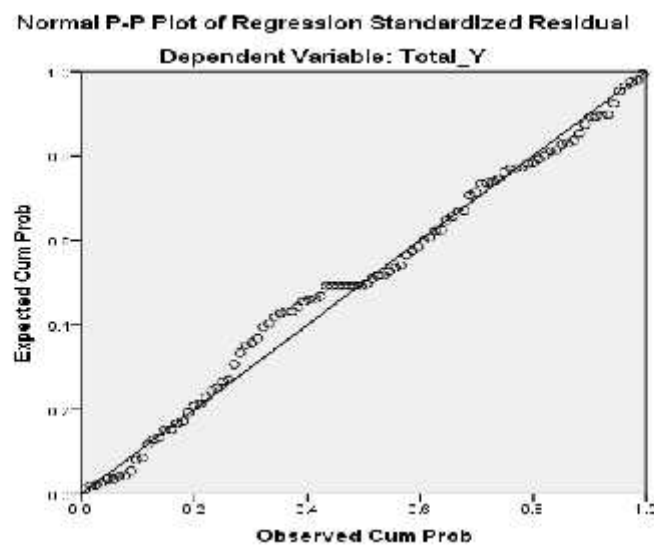
a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah variabel dependen, independen atau keduanya berdistribusi normal atau tidak. Nilai variabel dikatakan berdistribusi normal jika nilai

variabel tersebut sebagian besar mendekati nilai rata-ratanya. Hal tersebut dapat diketahui dengan menggambarkan penyebaran data melalui sebuah grafik. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonalnya, maka model tersebut memenuhi asumsi normalitas.

Grafik tersebut menggunakan *Normal Probability Plot* yaitu dengan membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal digambarkan dengan diagonal lurus dari kiri bawah kekanan atas. Hasil uji normalitas adalah sebagai berikut:

Gambar 3.1
Hasil Uji Normalitas



Sumber : Hasil Olahan Data SPSS,2019.

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa *normal probability plot*, tampilan grafiknya menunjukkan pola penyebaran disekitar

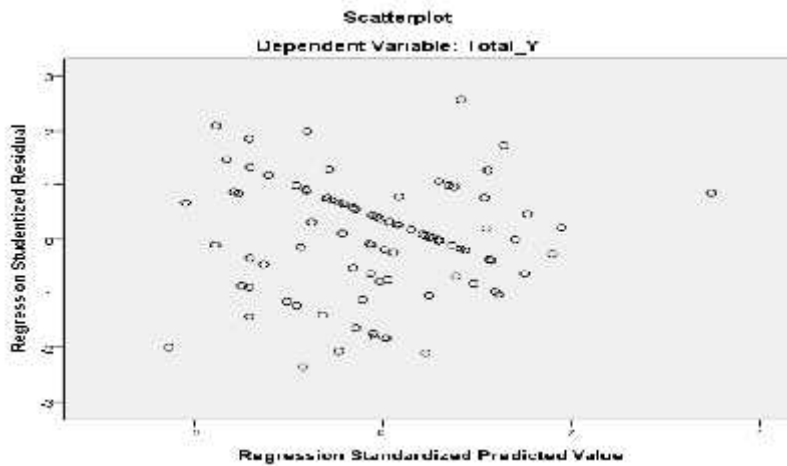
garis diagonal. Maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal.

b. Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Sebaliknya jika varian variabel pada model regresi memiliki nilai yang sama (konstan) maka disebut dengan heterokedastisitas.

Cara yang digunakan dalam pengujian ini adalah dengan metode analisis grafik. Metode analisis grafik dilakukan dengan mengamati *scatteplot* dimana sumbu horizontal menggambarkan nilai *predicted standardized* sedangkan sumbu vertical menggambarkan nilai *residual studentized*. Jika *scatterplot* membentuk pola tertentu, hal itu menunjukkan adanya masalah heteroskedastisitas pada model regresi yang dibentuk. Sedangkan jika *scatterplot* menyebar secara acak maka hal itu menunjukkan tidak terjadinya masalah heteroskedastisitas pada model regresi yang dibentuk.

Gambar 3.2
Hasil Uji Heterokedastisitas



Sumber: Hasil Olahan Data SPSS, 2019.

Data grafik *scatterplot* diatas dapat dilihat bahwa titik menyebar secara acak dan tidak berkumpul disatu tempat. Hal ini membuktikan tidak terjadi heterokedastisitas pada data dan sudah memenuhi uji asumsi klasik.

c. Uji Multikolonieritas

Multikolinieritas berarti terjadi korelasi linier yang mendekati sempurna antar lebih dari dua variabel bebas. Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi yang terbentuk ada korelasi yang tinggi atau sempurna diantara variabel bebas atau tidak. Jika dalam model regresi yang terbentuk terdapat korelasi yang tinggi atau sempurna diantara variabel maka model regresi tersebut dinyatakan mengandung gejala multikolinier.

Untuk mendeteksi adanya multikolonieritas dapat dilihat nilai dari tolerance dari lawannya nilai *Variance inflation factor* (VIF).

Jika nilai VIF tidak lebih dari 10 maka model dinyatakan tidak mengandung multikolinieritas.

Tabel 3.17
Hasil Uji Multikolonieritas

		Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	6.083	3.210		1.895	.061		
	pengetahuan pajak	.170	.125	.133	1.368	.174	.790	1.265
	sanksi pajak	.229	.088	.245	2.602	.011	.849	1.178
	kesadaran wajib pajak	-.126	.094	-.130	-1.342	.183	.794	1.259
	tingkat kepercayaan pada pemerintah	.425	.105	.378	4.041	.000	.855	1.170

a. Dependent Variable: efektifitas pemungutan PBB-P2

Sumber: Data diolah

Dari hasil uji multikolonieritas diatas diperoleh nilai *tolerance* untuk semua variabel $> 0,10$ dan nilai VIF untuk semua variabel < 10 . Oleh karena tidak ada nilai *tolerance* yang $< 0,10$ dan tidak ada nilai VIF > 10 . Maka dapat disimpulkan data ini memenuhi uji asumsi klasik multikolonieritas.

3. Analisis Regresi Berganda

Dalam analisis regresi berganda jumlah variabel bebas yang digunakan untuk memprediksi variabel tergantung lebih dari satu. Analisis ini digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel independen

mengalami kenaikan atau penurunan. Variabel bebas dari penelitian ini adalah Pengetahuan Pajak (X_1), Sanksi Pajak (X_2), Kesadaran Wajib Pajak (X_3), dan Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah (X_4). Sedangkan variabel terikatnya adalah Efektifitas Pemungutan Pajak (Y). Rumus persamaan linier berganda sebagai

berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + \dots + b_nX_n + e$$

Keterangan:

Y = Efektifitas Pemungutan Pajak

a = konstanta

X_1 = Pengetahuan Pajak

X_2 = Sanksi Pajak

X_3 = Kesadaran Wajib Pajak

X_4 = Tingkat kepercayaan pada pemerintah

b_1, b_2, b_3, b_4 = koefisien regresi

e = error

Hasil analisis regresi berganda dengan program SPSS dapat dilihat pada tabel berikut:

IAIN JEMBER

Tabel 3.18
Hasil Uji Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	6.083	3.210		1.895	.061		
pengetahuan pajak	.170	.125	.133	1.368	.174	.790	1.265
sanksi pajak	.229	.088	.245	2.602	.011	.849	1.178
kesadaran wajib pajak	-.126	.094	-.130	-1.342	.183	.794	1.259
tingkat kepercayaan pada pada pemerintah	.425	.105	.378	4.041	.000	.855	1.170

a. Dependent Variable: efektifitas pemungutan PBB-P2

Sumber: Data diolah

$$Y = 6,083 + 0,170 X_1 + 0,229 X_2 - 0,126 X_3 + 0,425 X_4$$

Penjelasan hasil persamaan regresi linier berganda diatas adalah sebagai berikut:

- a. Besarnya nilai konstanta (a) menunjukkan nilai yang positif yaitu 6,083 dimana mempunyai arti adanya pengaruh yang positif terhadap Pengetahuan Pajak (X₁), Sanksi Pajak (X₂), Kesadaran Wajib Pajak (X₃), dan Tingkat kepercayaan Pada Pemerintah tetap atau konstan maka akan mempengaruhi variabel Efektifitas Pemungutan PBB-P2 (Y) sebesar 6,083.
- b. Nilai koefisien regresi pengetahuan pajak(X₁) bernilai positif sebesar 0,170, menyatakan bahwa, jika nilai X₁ naik satu satuan, maka akan menaikkan nilai efektifitas pemungutan PBB-P2 sebesar 0,170 dengan asumsi nilai variabel bebas lainnya bernilai tetap atau nol (0). Jadi efektifitas pemungutan PBB-P2 akan

meningkat apabila pengetahuan pajak semakin meningkat.

- c. Nilai koefisien regresi sanksi pajak (X_2) bernilai positif sebesar 0,229, menyatakan bahwa jika nilai X_2 naik satu satuan, maka akan menaikkan nilai efektifitas pemungutan PBB-P2 sebesar 0,229 dengan asumsi nilai variabel bebas lainnya bernilai tetap atau nol (0). Jadi efektifitas pemungutan PBB-P2 akan meningkat apabila pemahaman tentang sanksi pajak semakin meningkat.
- d. Nilai koefisien regresi kesadaran wajib pajak (X_3) bernilai negatif atau berlawanan sebesar -0,126, menyatakan bahwa jika nilai X_3 naik satu satuan, dalam hal ini kesadaran wajib pajak menunjukkan mempunyai hubungan yang berlawanan arah dengan kesadaran wajib pajak. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan kesadaran wajib pajak satu satuan maka variabel efektifitas pemungutan PBB-P2 akan turun sebesar -0,126.
- e. Nilai koefisien regresi Tingkat kepercayaan pada pemerintah (X_4) bernilai positif sebesar 0,425, menyatakan bahwa jika nilai X_4 naik satu satuan, maka akan menaikkan nilai efektifitas pemungutan PBB-P2

didesa watukebo sebesar 0,425 dengan asumsi nilai variabel bebas lainnya bernilai tetap atau nol (0). Jadi efektifitas pemungutan PBB-P2 akan meningkat apabila tingkat kepercayaan pada pemerintah semakin meningkat.

a. Uji Determinasi (R^2)

Pada regresi berganda, koefisien dari determinasi berganda mempresentasikan proporsi dari variasi Y yang dijelaskan oleh seperangkat variabel independen. Koefien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangan variasi variabel dependen.

Nilai koefien determinasi adalah diantara nol dan satu.

Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Tabel 3.19
Hasil Uji Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.550 ^a	.303	.273	1.868

a. Predictors: (Constant), Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Pajak

Sumber: Data diolah

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa nilai R square sebesar 0,303. Hal ini dapat diartikan bahwa variabel pengetahuan pajak (X1), sanksi Pajak (X2), kesadaran wajib pajak (X3), dan tingkat kepercayaan pada pemerintah (X4) terhadap efektifitas pemungutan PBB-P2 (Y) adalah 30,3 % dan sisanya 69,7 % dipengaruhi oleh variabel lain diluar pengetahuan pajak, sanksi pajak, kesdaran wajib pajak, dan tingkat kepercayaan pada pemerintah.

b. Uji Regresi Parsial (Uji t)

Uji t memiliki tujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Uji t digunakan untuk membandingkan rata-rata dua populasi dengan data yang berskala interval.

Adapun langkah-langkah uji t adalah sebagai berikut:

1) Menentukan hipotesis

a) $H_1 : \beta = 0$ artinya dalam notasi hipotesis H_1 adalah pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap efektifitas pemungutan PBB P2.

$H_0 :$ artinya dalam notasi hipotesis H_0 adalah pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap efektifitas pemungutan PBB P2.

b) $H_2 : \beta = 0$ artinya dalam notasi hipotesis H_2 adalah sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap efektifitas pemungutan PBB P2.

$H_0 :$ artinya dalam notasi hipotesis H_0 adalah sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap efektifitas pemungutan PBB P2.

c) $H_3 : \beta = 0$ artinya dalam notasi hipotesis H_3 adalah kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap efektifitas pemungutan PBB P2.

$H_0 :$ artinya dalam notasi hipotesis H_0 adalah kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap efektifitas pemungutan PBB P2.

d) $H_4 : \beta = 0$ artinya dalam notasi hipotesis H_4 adalah tingkat kepercayaan pada pemerintah berpengaruh signifikan terhadap efektifitas pemungutan PBB P2.

$H_0 :$ artinya dalam notasi hipotesis H_0 adalah tingkat kepercayaan pada pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap efektifitas pemungutan PBB P2.

2) Menentukan derajat kepercayaan 5% ($\alpha = 0,05$) dari t hitung dan t table.

3) Menentukan t hitung dengan rumus:

$$t_{hitung} = r \frac{\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan:

r = nilai koefisien korelasi

n = jumlah sampel

4) Menentukan t tabel (diambil dari hasil table distribusi t pada $\alpha = 5\%$). Rumus $t_{tabel} = t (\alpha/2 : n - k - 1)$

5) Membuat kesimpulan:

Kriteria uji t :

a) Jika nilai $\text{sig} < 0,05$, nilai t hitung $> t$ table, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, menyatakan bahwa variabel independen (X) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y).

b) Jika nilai $\text{sig} > 0,05$, nilai t hitung $< t$ table, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, menyatakan bahwa variabel independen (X) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y).

Adapun nilai t_{tabel} dalam penelitian ini adalah 1,98580, nilai ini diperoleh dari $t_{tabel} = t (0,05/2 : 98 - 4 - 1)$. Berikut ini adalah hasil uji t menggunakan SPSS :

Tabel 3.20
Hasil Uji Parsial

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	6.083	3.210		1.895	.061
Pengetahuan Pajak	.170	.125	.133	1.368	.174
Sanksi Pajak	.229	.088	.245	2.602	.011
Kesadaran Wajib Pajak	-.126	.094	-.130	-1.342	.183
Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah	.425	.105	.378	4.041	.000

a. Dependent Variable: Efektifitas Pemungutan PBB-P2

Sumber: Data diolah

Berdasarkan data diatas, maka diperoleh:

- 1) Nilai t_{hitung} pada variabel pengetahuan pajak adalah sebesar 1,368. Sedangkan nilai t_{tabel} sebesar 1,98580 dengan tingkat signifikansi ($0,174 > 0,05$). Maka kesimpulannya $t_{hitung} 1,368 < 1,98580 t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, menyatakan bahwa variabel pengetahuan pajak (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel efektifitas pemungutan PBB-P2 (Y).
- 2) Nilai t_{hitung} pada variabel sanksi pajak adalah sebesar 2,602. Sedangkan nilai t_{tabel} sebesar 1,98580 dengan tingkat signifikansi ($0,011 < 0,05$). Maka kesimpulannya $t_{hitung} 2,602 > 1,98580 t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, menyatakan bahwa variabel sanksi pajak (X2) berpengaruh signifikan terhadap variabel efektifitas pemungutan PBB-P2 (Y).

- 3) Nilai t_{hitung} pada variabel kesadaran wajib pajak adalah sebesar -1,342. Sedangkan nilai t_{tabel} sebesar 1,98580 dengan tingkat signifikansi ($0,183 > 0,05$). Maka kesimpulannya $t_{hitung} > -1,425 < 1,98761 t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, menyatakan bahwa variabel kesadaran wajib pajak (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel efektifitas pemungutan PBB-P2 (Y).
- 4) Nilai t_{hitung} pada variabel tingkat kepercayaan pada pemerintah adalah sebesar 4,041. Sedangkan nilai t_{tabel} sebesar 1,98580 dengan tingkat signifikansi ($0,000 < 0,05$). Maka kesimpulannya $t_{hitung} > 4,041 > 1,98580 t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, menyatakan bahwa variabel tingkat kepercayaan pada pemerintah (X4) berpengaruh signifikan terhadap variabel efektifitas pemungutan PBB-P2 (Y).

c. Uji Regresi Koefisien Regresi Simultan (Uji F)

Uji pengaruh simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen. Hasil *F-test* ini pada *output* SPSS dapat dilihat pada table ANOVA. Hasil *F-test* menunjukkan variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen jika *P-value* lebih kecil dari *level of*

significant yang ditentukan, atau F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} .

Adapun langkah-langkah uji F adalah sebagai berikut:

a) Menentukan Hipotesis

$H_5 : \beta_1 : \beta_2 : \beta_3 : \beta_4 = 0$ artinya secara simultan ada pengaruh signifikan antara variabel independen yaitu *tax payer factors* yang terdiri dari pengetahuan pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan tingkat kepercayaan pada pemerintah terhadap efektifitas pemungutan PBB P2.

$H_0 : \beta_1 : \beta_2 : \beta_3 : \beta_4 = 0$ artinya secara simultan tidak ada pengaruh signifikan antara variabel independen yaitu *tax payer factors* yang terdiri dari pengetahuan pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan tingkat kepercayaan pada pemerintah terhadap efektifitas pemungutan PBB P2.

b) Menentukan tingkat signifikansi dengan menggunakan $\alpha = 5\%$ ($\alpha = 0,05$) dari F_{hitung} dan F_{tabel} .

c) Menentukan F_{hitung} dengan rumus :

$$F = \frac{R^2/(k-1)}{1-R^2/(n-k)}$$

Keterangan:

F = Nilai F_{hitung}

R^2 = Koefisien determinasi

k = jumlah Variabel

n = Jumlah Pengamatan (ukuran sampel).

d) Menentukan F_{tabel} dengan $\alpha = 5\%$ dengan tingkat keyakinan 95%. Adapun rumus F_{tabel} adalah $F_{\text{tabel}} = f(k : n - k)$

e) Membuat kesimpulan

- 1) Jika $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, menyatakan bahwa masing-masing variabel independen secara simultan mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- 2) Jika $F_{\text{hitung}} < F_{\text{tabel}}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak, menyatakan bahwa masing-masing variabel independen secara simultan tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Adapun nilai F_{tabel} dalam penelitian ini adalah 2,47 nilai ini diperoleh dari $F_{\text{tabel}} = F(4 : 98 - 4)$. Berikut ini adalah hasil uji t menggunakan SPSS :

Tabel 3.21
Hasil Uji Simultan

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	140.934	4	35.233	10.094	.000 ^b
	Residual	324.617	93	3.491		
	Total	465.551	97			

a. Dependent Variable: Efektifitas Pemungutan PBB-P2

b. Predictors: (Constant), Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Pajak

Sumber: Hasil Olahan Data SPSS, 2019.

Berdasarkan hasil data diatas diperoleh nilai signifikansi untuk pengaruh X1, X2, X3, dan X4 secara simultan terhadap Y sebesar $0,000 < 0,05$, dengan nilai Fhitung $10,094 > 2,47$ Ftabel. Maka H0 ditolah dan Ha diterima , dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan tingkat kepercayaan pada pemerintah (H₅) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap efektifitas pemungutan PBB-P2 (Y).

D. Pembahasan

Berdasarkan pengujian data, hasil regresi linier berganda untuk menguji variabel-variabel yang berpengaruh terhadap efektifitas pemungutan pajak di Desa Watukebo. Adapun persamaan regresi linier berganda yang didapatkan yaitu

$$Y = 6,083 + 0,170 X1 + 0,229 X2 - 0,126 X3 + 0,425 X4.$$

Dimana: Y = Efektifitas Pmungan PBB-P2

X1 = Pengetahuan Pajak

X2 = Sanksi Pajak

X3 = Kesadaran Wajib Pajak

X4 = Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah

1. Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Efektifitas Pemungutan PBB-P2 di Desa Watukebo Kecamatan Blimbingsari Kab. Banyuwangi

Hasil pengujian hipotesis variabel pengetahuan pajak dengan SPSS, terlihat bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $1,368 < 1,98580$ dan nilai signifikansi = $0,174 > 0,05$, maka keputusannya adalah H_0 diterima dan H_a ditolak. Oleh karena itu menyatakan bahwa variabel pengetahuan pajak (X1) tidak berpengaruh signifikan variabel efektifitas pemungutan PBB-P2 (Y).

Penelitian ini didukung oleh penelitian Fitriana Ramadhani (2014) Artinya, Kurangnya pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan karena wajib pajak kurang memahami dan mengetahui peraturan perpajakan. Semakin paham dan mengerti wajib pajak akan peraturan perpajakan akan meningkatkan efektifitas pemungutan pajak.

Pengetahuan itu sendiri antara lain Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia, dan Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan. Pengetahuan Perpajakan merupakan salah satu faktor yang menentukan tingkat efektifitas pemungutan pajak pada Desa Watukebo dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

2. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Efektifitas Pemungutan PBB-P2 di Desa Watukebo Kecamatan Blimbingsari Kab. Banyuwangi

Hasil pengujian hipotesis variabel sanksi pajak, terlihat bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $2,602 < 1,98580$ dan nilai signifikansi = $0,011 < 0,05$, maka keputusannya adalah H_0 ditolak dan H_a diterima. Oleh karena itu menyatakan bahwa variabel sanksi pajak (X_2) berpengaruh signifikan terhadap variabel efektifitas pemungutan PBB-P2 (Y). Penelitian ini didukung oleh penelitian Teguh Erawati (2017) tentang menunjukkan bahwa secara parsial sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi adalah tanggungan, tindakan, hukuman dan sebagainya untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang yang berlaku. sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan. Sehingga apabila terjadi pelanggaran maka wajib pajak dihukum dengan indikasi kebijakan perpajakan dan undang-undang perpajakan.

Sebagaimana dimaklumi suatu kebijakan berupa pengenaan sanksi dapat dipergunakan untuk 2 (dua) maksud, yang pertama adalah untuk mendidik dan yang kedua adalah untuk menghukum. Mendidik dimaksudkan agar mereka yang dikenakan sanksi akan menjadi lebih baik dan lebih mengetahui hak dan kewajibannya

sehingga tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Maksud yang kedua adalah untuk menghukum sehingga pihak yang terhukum akan menjadi jera dan tidak lagi melakukan kesalahan yang sama.

3. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Efektifitas Pemungutan PBB-P2 di Desa Watukebo Kecamatan Blimbingsari Kab. Banyuwangi

Hasil pengujian hipotesis variabel kesadaran wajib pajak, terlihat bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $-1,342 < 1,98580$ dan nilai signifikansi = $0,183 > 0,05$, maka keputusannya adalah H_0 diterima dan H_a ditolak. Oleh karena itu menyatakan bahwa variabel kesadaran wajib pajak (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel efektifitas pemungutan PBB-P2 (Y).

Penelitian ini didukung oleh penelitian Umi Pratiwi (2011) Artinya Kesadaran membayar pajak Wajib Pajak orang pribadi masih kurang. Banyak responden mengakui bahwa kemauan untuk membayarkan kewajiban pajaknya dipengaruhi oleh teguran atau harus diingatkan oleh keluarga, kerabat maupun petugas pemungut pajak.

Kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak merupakan hal terpenting guna membiayai pembangunan demi kepentingan dan kesejahteraan umum. Masyarakat yang memiliki kesadaran pajak tinggi akan mengerti fungsi pajak, baik dalam hal manfaat pajak untuk masyarakat maupun diri pribadi. Dengan demikian

masyarakat akan sukarela dan disiplin membayar pajak tanpa paksaan.

4. Pengaruh Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Efektifitas Pemungutan PBB-P2 di Desa Watukebo Kecamatan Blimbingsari Kab. Banyuwangi

Hasil pengujian hipotesis variabel tingkat kepercayaan pada pemerintah pajak, terlihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $4,041 > 1,98580$ dan nilai signifikansi = $0,000 < 0,05$, maka keputusannya adalah H_0 ditolak dan H_1 diterima. Oleh karena itu menyatakan bahwa variabel tingkat kepercayaan pada pemerintah (X_4) berpengaruh signifikan terhadap variabel efektifitas pemungutan PBB-P2 (Y).

Penelitian ini didukung oleh penelitian Fitriana Ramadhani (2014)

Artinya, semakin baik sistem pemerintahan maka semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan semakin efektifitas pula dalam pemungutan pajak.

Salah satu usaha membangun kepercayaan rakyat kepada pemerintah adalah dengan mewujudkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa atau yang dikenal dengan istilah *good governance*. Pedoman umum yang dikeluarkan oleh Komite Nasional kebijakan *Governance* (KNKG) menyebutkan terdapat 5 asas *good governance* antara lain transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran dan kesetaraan. Ketika asas

itu dipenuhi oleh pemerintah maka pemerintahan tersebut dianggap bersih (*good governance*).

5. Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Efektifitas Pemungutan PBB – P2 di Desa Watukebo Kecamatan Blimbingsari Kab. Banyuwangi

Hasil pengujian hipotesis variabel pengetahuan pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak dan tingkat kepercayaan pada pemerintah terlihat bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $10,194 > 2,47$ dan nilai signifikansi = $0,000 < 0,05$, maka keputusannya adalah H_0 ditolak dan H_a diterima. Oleh karena itu menyatakan bahwa variabel pengetahuan pajak (X1), sanksi pajak (X2), kesadaran wajib pajak (X3), dan tingkat kepercayaan pada pemerintah (X4) berpengaruh signifikan secara simultan terhadap efektifitas pemungutan PBB-P2 (Y).

Jadi secara simultan faktor yang mempengaruhi efektifitas pemungutan PBB-P2 diantaranya yaitu pengetahuan pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan tingkat kepercayaan pada pemerintah. Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian uji simultan ini yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan tingkat kepercayaan pada pemerintah

berpengaruh signifikan secara simultan terhadap efektifitas pemungutan PBB-P2 di desa watukebo.

Adapun pengaruh dari pengetahuan pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan tingkat kepercayaan pada pemerintah terhadap efektifitas pemungutan PBB-P2 di desa watukebo sebesar 30,3 % sedangkan sisanya 69,7 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak disebutkan dalam penelitian ini. Variabel lain yang dapat mempengaruhi efektifitas pemungutan PBB-P2 misalnya kualitas pelayanan.

Jadi berdasarkan interpretasi di atas dapat dikatakan bahwa secara parsial yang berpengaruh signifikan terhadap efektifitas pemungutan PBB-P2 adalah sanksi pajak dan tingkat kepercayaan pada pemerintah. Sedangkan secara simultan yang berpengaruh signifikan adalah pengetahuan pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan tingkat kepercayaan pada pemerintah.

IAIN JEMBER

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan mengenai pengetahuan pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan tingkat kepercayaan pada pemerintah terhadap efektifitas pemungutan PBB-P2 didesa watukebo dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara parsial menunjukkan bahwa pengaruh variabel pengetahuan pajak sebesar 1,368 terhadap efektifitas pemungutan PBB-P2. Sedangkan nilai t_{tabel} sebesar 1,98580 dengan tingkat signifikansi ($0,174 > 0,05$). Maka kesimpulannya t_{hitung} $1,368 < 1,98580$ t_{tabel} , maka H_0 diterima dan H_a ditolak, menyatakan bahwa variabel pengetahuan pajak (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel efektifitas pemungutan PBB-P2 (Y). Penelitian ini didukung oleh penelitian Fitriana Ramadhani (2014) Artinya, Kurangnya pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan karena wajib pajak kurang memahami dan mengetahui peraturan perpajakan. Semakin paham dan mengerti wajib pajak akan peraturan perpajakan akan meningkatkan efektifitas pemungutan pajak.
2. Secara parsial menunjukkan bahwa pengaruh variabel sanksi pajak sebesar 2,602 terhadap efektifitas pemungutan PBB-P2. Sedangkan nilai t_{tabel} sebesar 1,98580 dengan tingkat signifikansi ($0,011 < 0,05$). Maka kesimpulannya t_{hitung} $2,602 > 1,98580$ t_{tabel} , maka H_0 ditolak dan H_a diterima, menyatakan bahwa variabel sanksi pajak (X2) berpengaruh

signifikan terhadap variabel efektifitas pemungutan PBB-P2 (Y). Penelitian ini didukung oleh penelitian Teguh Erawati (2017) tentang menunjukkan bahwa secara parsial sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Secara parsial menunjukkan bahwa pengaruh variabel kesadaran wajib pajak sebesar -1,342 terhadap efektifitas pemungutan PBB-P2. Sedangkan nilai t_{tabel} sebesar 1,98580 dengan tingkat signifikansi ($0,183 > 0,05$). Maka kesimpulannya $t_{hitung} -1,342 < 1,98580 t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, menyatakan bahwa variabel kesadaran wajib pajak (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel efektifitas pemungutan PBB-P2 (Y). Penelitian ini didukung oleh penelitian Umi Pratiwi (2011) Artinya Kesadaran membayar pajak Wajib Pajak orang pribadi masih kurang. Banyak responden mengakui bahwa kemauan untuk membayarkan kewajiban pajaknya dipengaruhi oleh teguran atau harus diingatkan oleh keluarga, kerabat maupun petugas pemungut pajak.
4. Secara parsial menunjukkan bahwa pengaruh variabel tingkat kepercayaan pada pemerintah sebesar 4,041 terhadap efektifitas pemungutan PBB-P2. Sedangkan nilai t_{tabel} sebesar 1,98580 dengan tingkat signifikansi ($0,000 < 0,05$). Maka kesimpulannya $t_{hitung} 4,041 > 1,98580 t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, menyatakan bahwa variabel tingkat kepercayaan pada pemerintah (X4) berpengaruh signifikan terhadap variabel efektifitas pemungutan PBB-P2 (Y). Penelitian ini didukung oleh penelitian Fitriana Ramadhani (2014) Artinya, semakin baik sistem pemerintahan maka

semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan semakin efektifitas pula dalam pemungutan pajak.

5. Secara simultan menunjukkan bahwa variabel independen (pengetahuan pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan tingkat kepercayaan pada pemerintah) mempunyai pengaruh sebesar $F_{hitung} 10,094 > \text{nilai } F_{tabel} 2,47$. Maka H_0 ditolak dan H_a diterima, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan tingkat kepercayaan pada pemerintah (H_5) terdapat pengaruh signifikan X_1 , X_2 , X_3 , dan X_4 secara simultan terhadap Y .

B. Saran

1. Dari peneliti ini diharapkan pemungut pajak dalam upaya meningkatkan efektifitas pemungutan di Desa Watukebo:
 - a. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dalam hal ini tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah sangat berpengaruh besar terhadap efektifitas pemungutan pajak. Hal ini telah dikuatkan oleh penelitian ini. Salah satu cara untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah adalah dengan mewujudkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
 - b. Melakukan Penegakan dan Penindakan sanksi/hukuman bagi aparat pelaksana tugas dan wajib pajak yang melanggar aturan. Dalam hal ini sanksi pajak berpengaruh besar dalam meningkatkan efektifitas pemungutan pajak.

- c. Pemerintah ataupun pemungut pajak mengadakan sosialisasi perpajakan mengenai pengetahuan serta pentingnya akan kesadaran dalam membayar pajak.
 - d. Melakukan Peningkatan kualitas tenaga kerja pada bidang pemungutan PBB-P2.
 - e. Melakukan Peningkatan sistem administrasi yang memadai dalam pelayanan Pemungutan PBB-P2.
2. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian yang sama, diharapkan untuk meneliti variabel lain diluar penelitian ini misalnya pelayanan fiskus/ pemungut pajak, pelayanan pembayaran pajak serta nasionalisme sehingga memiliki pembahasan yang lebih luas.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Grafindo Persada.
- Departemen Agama RI. 2009. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema.
- Efferin, Sujoko, dkk. 2008. *Metode Penelitian Akuntansi, Mengungkap Fenomena dengan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi SPSS*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- IAIN Jember. 2017. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.
- Ikhsan, Arfan. 2008. *Metodologi Penelitian Akuntansi Keperilakuan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak. 2016. *Kesadaran Pajak* (Jakarta: Tim Edukasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak).
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Mundir. 2014. *Statistika Pendidikan*. Jember: Stain Jember-Press.
- Prasetyo, Bambang dan Lina Miftahul Jannah. 2008. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Riduwan dan Sunarto. 2014. *Pengantar Statistik Untuk Penelitian Pendidikan, Sosial, Ekonomi, Komunikasi, dan Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Robbins, Stephen P. 1996. *Perilaku Organisasi Konsep, Kontroversi, dan Aplikasi*. Jakarta: Prenhallindo.
- Sarwono, Jonathan. 2008. *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *SPSS Untuk Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Suliyanto. 2011. *Ekonomitrika Terapan, Teori dan Aplikasi dengan SPSS*. Yogyakarta: Andi.

Umar, Husein. 2008. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Umar, Husein. 2008. *Desain Penelitian MSDM dan Perilaku Karyawan, Paradigma, Positifistik dan Berbasis Pemecahan Masalah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Jurnal dan Skripsi

Adi, Titis Wahyu. 2018. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Cilacap Tahun 2018*. Skripsi, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

Darnita, Cristi Devi dan Yenni Mangoting. 2014. *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Efektifitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Pedesaan Kota Palangka Raya*. *Tax & Accounting Review*, Vol 4, No. 2.

Fikriningrung, Winda Kurnia. 2012. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari)*. Skripsi, Semarang: Universitas Diponegoro.

Handayani. 2012. *Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas*. *Jurnal Universitass Soedirman*.

Harefa, Mandala. 2016. *Kendala Implementasi Dan Efektivitas Pemungutan Pajak PBB-P2 Oleh Pemerintah Kota Makassar*. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, Vol. 7, No. 1.

Hasbar, Mustafa dan Agung Wijaya, *Efektifitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) Dengan Pendekatan Strategy SWOT Analysis Di Kabupaten Enrekang*. Magister Administrasi Publik STISIP Muhammadiyah Rappang Sidenreng Rappang, Indonesia.

Hermansyah, Andi Abdillah. 2015. *Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) Di Dispenda Kota Makassar*. Skripsi, Universitas Hasanuddin.

- Nuansa, Fajar. 2012. *Efektifitas Pemungutan Pajak Penggunaan Energi Listrik Atas Listrik Yang Dihasilkan Oleh Badan Usaha Milik Swasta PT. X (Studi Atas DPPKA Kabupaten Bekasi)*. Skripsi, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Pratiwi, Umi. 2011. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas*. Skripsi. Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman.
- Purnamasari, Apriani, dkk. 2017. *Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Dan Hukum, Serta Nasionalisme Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB-P2 (Studi Pada Wajib Pajak PBB-P2 Di Kota Banjar)*. Jurnal Akuntansi dan Auditing. Vol. 14, No. 1.
- Ramadhani, Fitriana. 2014. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Surakarta)*. Skripsi. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Rezki, Iftahul. 2014. *Pengaruh Tax Payer Factors terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Restoran (Studi Empiris di Kota Padang)*. Skripsi. Padang: Universitas Negeri Padang.
- Ritonga, Pandapotan. 2012. *Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur*. Jurnal Saindikom Vol. 11, No.3.
- Setyowati, Yuni. 2017. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Kalidengen, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017*. Universitas Negeri Yogyakarta. Jurnal Profita.
- Togler, B. 2007. *Tax compliance and tax morale: A theoretical and empirical analysis*. Edward Elgar Publishing, Inc.

Website

- Direktorat Jenderal Pajak. *Pengertian Pajak*. <https://pajak.go.id/id/pajak> diakses pada tanggal 19 September 2019.
- Ditjen PP. Kemenkumham, *Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Perkotaan*. http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/ld/2012/KAB_BANYUWANGI_6_2012.pdf, diakses pada tanggal 23 September 2019.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://www.kbbi.web.id/tahu>, diakses pada tanggal 4 Oktober 2019.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://www.kbbi.web.id/sanksi>, diakses pada tanggal 4 Oktober 2019.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://www.kbbi.web.id/sadar>, diakses pada tanggal 4 Oktober 2019.

Kementerian Keuangan, UU Nomor 28 Tahun 2009 http://www.djpk.depkeu.go.id/attach/post-no-28-tahun-2009-tentang-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah/UU-427-973-UU_28_Tahun_2009_Ttg_PDRD.pdf diakses pada tanggal 19 September 2019.

Kementerian Keuangan. 2019. *Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2019*, <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-realisasi-pendapatan-belanja-dan-pembiayaan-apbn-semester-i-tahun-2019>. Diakses pada tanggal 20 September 2019.

Kementerian Keuangan, <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/mulai-1-januari-2014-semua-kabupatenkota-di-indonesia-wajib-kelola-pbb-sendiri/>, diakses pada tanggal 26 Mei 2019.

Times Banyuwangi, <https://www.timesbanyuwangi.com/berita/23503/realisasi-pajak-kecamatan-blimbingsari-desa-bomo-terbaik-desa-gintangan-terburuk>, diakses pada tanggal 18 Desember 2019.

IAIN JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sri Bekti Ariyani
NIM : E20163014
Semester : VIII (Delapan)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/ Akuntansi Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **"Pengaruh *Tax Payer Factors* Terhadap Efektifitas Pemungutan PBB-P2 (Studi Kasus Desa Watukebo, Kec. Blimbingsari, Kab. Banyuwangi)"** adalah benar-benar hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Jember, 03 Februari 2020

Yang menyatakan



Sri Bekti Ariyani
NIM. E20163014



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Telp. : (0331) 487550, 427005, Fax. (0331) 427005, Kode Pos : 68136
Website : WWW.in-jember.ac.id – e-mail : info@iain-jember.ac.id

J E M B E R

nomor : B- 870 /In.20/7.a/PP.00.9/II /2019
hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth. Kepala Desa Watukebo, Kec. Blimbing Sari, Kab. Banyuwangi
di-

TEMPAT

Diberitahukan dengan hormat, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu
pimpinan untuk memberikan izin penelitian dengan identitas sebagai berikut :

Nama Mahasiswa : SRI BEKTI ARIYANI
NIM : E20163014
Semester : VII
Prodi : AKUNTANSI SYARIAH
No Telpon : 081216939085
Dosen Pembimbing : Nur Ika Mauliyah, S.E., M.Ak
NIP : 198803012018012001
Judul Penelitian : Pengaruh *Tax Payer Factors* Terhadap Efektifitas
Pemungutan PBB-P2 (Studi Desa Watukebo Kec.
Blimbing Sari Kab. Banyuwangi)

Demikian Surat Permohonan izin penelitian ini, atas perhatian dan
kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Jember, 18 November 2019

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik




Abdul Rokhim



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN BLIMBINGSARI
DESA WATUKEBO

Jln. Berdikari No 104 E-mail: watukeboblimbingsanbwi@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 145/ ²⁴⁵ / 429.525.03/2019

yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hj. SRI BUNIK EKA DIANA, S.Pd
Jabatan : Kepala Desa Watukebo, Kec. Blimbingsari

yang ini menerangkan bahwa :

Nama Lengkap : SRI BEKTI ARIYANI
Jenis Kelamin : Perempuan
NIM : E20163014
Semester : VII
Prodi : AKUNTANSI SYARIAH
NIP : 1988030120180120001
Status Perkawinan : Belum Kawin
Judul Penelitian : Pengaruh Tax Payer Factors Terhadap Efektifitas Pemungutan PBB-P2 (Studi Desa Watukebo Kecamatan Blimbingsari Kab. Banyuwangi

Telah selesai melakukan penelitian dengan pengambilan data primer dengan penelitian Pengaruh Tax Payer Factors Terhadap Efektifitas Pemungutan PBB-P2 Studi Desa Watukebo Kecamatan Blimbingsari Kab. Banyuwangi selama tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 06 Desember 2019 dalam rangka penyusunan Tesis.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watukebo, 06 Desember 2019
Kepala Desa Watukebo



Hj. SRI BUNIK EKA DIANA, S.Pd

